



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123/S TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri/Pimpinan lembaga wajib menetapkan IKU untuk kementerian koordinator/departemen/kementerian negara lembaga dan unit organisasi setingkat eselon I serta unit kerja mandiri di bawahnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

KEDUA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

KETIGA : Indikator Kinerja terdiri atas:
a. Daftar Indikator Kinerja; dan
b. Manual Indikator Kinerja.

KEEMPAT : Daftar Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a terdiri atas:
a. Sasaran Strategis/Sasaran Program; dan
b. Indikator Kinerja.

KELIMA : Manual Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b merupakan referensi indikator kinerja berisi tentang data dan informasi yang sekurang-kurangnya memuat nama Sasaran Strategis/Sasaran Program, deskripsi sasaran, nama Indikator Kinerja, definisi, formula, tujuan, satuan pengukuran, unit penanggung jawab, penyedia data, sumber data, jenis konsolidasi periode, jenis konsolidasi lokasi, polarisasi, periode pelaporan, dan target kinerja.

KEENAM : Daftar Indikator Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Kementerian Koordinator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.

KETUJUH : Daftar Indikator Kinerja dan Manual Indikator Kinerja unit eselon I sebagaimana tercantum dalam lampiran II sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.

KEDELAPAN : Pimpinan unit eselon I selanjutnya menyusun perjanjian kinerja eselon II yang berisi Indikator Kinerja unit eselon II masing-masing dengan berpedoman pada Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VI Keputusan Menteri Koordinator ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sejak tanggal 25 Maret 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2025

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AYODHIA G.L. KALAKE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
123/S TAHUN 2025 TENTANG INDIKATOR
KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

A. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA
Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan	Persentase Capaian Target Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

B. SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KERJA
Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan kriteria (NSPK) Manajemen ASN
	Opini BPK atas Laporan Keuangan
	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
	Nilai Kinerja Anggaran
	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Indeks Reformasi Hukum
Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital
	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik

C. DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA, DAN TATA RUANG

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KERJA
Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Merata dan Berkelanjutan	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Efektif dan Efisien	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritasi (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

D. DEPUTI BIDANG KOORDINASI KONEKTIVITAS

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KERJA
Terwujudnya Konektivitas Transportasi Nasional yang Merata dan Berkelanjutan	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Konektivitas
Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan yang Efektif dan Efisien di Bidang Konektivitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Konektivitas
	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Konektivitas
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Konektivitas yang Efektif dan Efisien	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritasi (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas

E. DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DASAR

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KERJA
Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur Dasar
Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur Dasar
	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur Dasar
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar yang Efektif dan Efisien	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

F. DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KERJA
Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Merata dan Berkelanjutan	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Efektif dan Efisien	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman

G. INSPEKTORAT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Opini BPK
Terwujudnya Hasil Pengawasan Internal yang Optimal	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
	Nilai Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
	Rata-rata Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Eselon I
	Jumlah Unit Kerja Eselon I yang Memenuhi Syarat Untuk Diusulkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Meningkatnya Peran APIP dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Indeks Kapabilitas Inspektorat

**Manual Indikator Kinerja
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

Sasaran Strategis (SS) : SS.1 Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan

Deskripsi SS : Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang merata memastikan bahwa seluruh wilayah, baik kota besar maupun daerah terpencil, mendapatkan akses yang setara terhadap fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik. Sementara itu, keberlanjutan dalam pembangunan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam, lingkungan, dan sosial dapat dijaga dan digunakan secara bijak agar tidak merugikan generasi mendatang.

Indikator Kinerja (IK) : IKSS 1.1 Persentase Capaian Target Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Kualitas IK : (x) *Ultimate Outcome* () *Intermediate Outcome* () *Immediate Outcome* () Output

Deskripsi IK :

Definisi:
 Persentase Capaian Target Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah tingkat keberhasilan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan terkait indikator sasaran pembangunan yang bersumber dari indikator Prioritas Nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2024-2029 dan/atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pihak-pihak yang terkait (*crosscutting*) dalam pencapaian indikator kinerja adalah kementerian/lembaga mitra koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Rincian Indikator RPJMN yang menjadi target pada Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia (KTI)
2. Indeks Ketahanan Air Nasional
3. Stok Infrastruktur terhadap PDB
4. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
5. Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional

Formula:

$$\frac{\text{Total Persentase Capaian Indikator RPJMN yang Diselesaikan oleh Menko}}{\text{Total Target Indikator RPJMN yang Ditugaskan untuk Diselesaikan}} \times 100\%$$

No. (1)	Indikator Pembangunan (2)	Target Tahun 2025 (3)	Realisasi Tahun 2025 (4)	Persentase Capaian Tahun 2025 (5=4:3)
1.	Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia (KTI)	21,4	X1	Y1=X1:21,4
2.	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,5	X2	Y2=X2:3,5
3.	Stok infrastruktur terhadap PDB	46,5	X3	Y3=X3:46,5
4.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	67	X4	Y4=X4:67
5.	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	57,29	X5	Y5=X5:57,29
	Persentase Capaian Target Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan		$\frac{(Y1+Y2+Y3+Y4+5)}{5}$	

Tujuan:

Mengetahui peran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam mencapai indikator sasaran pembangunan pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2024-2029 dan/atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Satuan Pengukuran :

Unit Penanggung jawab :

Penyedia Data :

Sumber Data :

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take last known value

Jenis Konsolidasi Lokasi : Sum Average Raw Data

Polarisasi : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Triwulan Semesteran Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	N/A	N/A	-
TRIWULAN 2	N/A	N/A	-
TRIWULAN 3	N/A	N/A	-
TRIWULAN 4	N/A	N/A	100%

**Manual Indikator Kinerja
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

Sasaran Strategis (SS)	:	SS.2 Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas
Deskripsi SS	:	Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sebagai bagian dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi serta melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan publik pada kementerian/lembaga dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSS 2.1 Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Kualitas IK	:	<input type="checkbox"/> Ultimate Outcome <input checked="" type="checkbox"/> Intermediate Outcome <input type="checkbox"/> Immediate Outcome <input type="checkbox"/> Output
Deskripsi IK	:	<div style="background-color: #f8d7da; padding: 2px;">Definisi:</div> <p>Persentase isu-isu strategis bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.</p> <p>Pihak-pihak yang terkait (<i>crosscutting</i>) dalam pencapaian Indikator Kinerja adalah kementerian/lembaga mitra kordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.</p> <p>Isu strategis yang menjadi target pada Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Satu Tata Ruang (<i>One Spatial Planning Policy-OSPP</i>) 2. <i>Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)</i> 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan 5. Penyediaan hunian tapak, dan vertikal yang terintegrasi melalui <i>Transit-oriented Development (TOD)/Transit-oriented Affordable Housing (TOAH)</i> <div style="background-color: #fff3cd; padding: 2px;">Formula:</div> $\frac{\text{Jumlah Isu Strategis yang Diselesaikan oleh Menko}}{\text{Jumlah Isu Strategis yang Ditugaskan untuk Diselesaikan}} \times 100\%$ <div style="background-color: #d1ecf1; padding: 2px;">Tujuan:</div> <p>Mengetahui jumlah isu strategis di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang telah diselesaikan sesuai target.</p>
Satuan Pengukuran	:	Persentase
Unit Penanggung jawab	:	Sekretariat Kementerian Koordinator
Penyedia Data	:	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Sumber Data	:	Laporan Kinerja Kemenko Infra
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input checked="" type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	N/A	N/A	20%
TRIWULAN 2	N/A	N/A	50%
TRIWULAN 3	N/A	N/A	75%
TRIWULAN 4	N/A	N/A	100%

**Manual Indikator Kinerja
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

Sasaran Strategis (SS)	SS.2 Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas																									
Deskripsi SS	Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sebagai bagian dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi serta melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan publik pada kementerian/lembaga dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.																									
Indikator Kinerja (IK)	IKSS 2.2 Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan																									
Kualitas IK	<input type="checkbox"/> Ultimate Outcome <input checked="" type="checkbox"/> Intermediate Outcome <input type="checkbox"/> Immediate Outcome <input type="checkbox"/> Output																									
Deskripsi IK	<p>Definisi: Hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan melakukan survey pelayanan ke kementerian/lembaga/<i>stakeholders</i> terkait yang berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan maupun instansi lain yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.</p> <p>Survei dilakukan menggunakan <i>Google Form</i> dengan model skala likert 1 sampai dengan 4. Penilaian dilakukan dengan mengacu ke Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>Pihak-pihak yang terkait (<i>crosscutting</i>) dalam pencapaian Indikator Kinerja adalah kementerian/lembaga mitra koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.</p> <p>Formula: Nilai pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan diperoleh dari nilai rata-rata hasil survei yang telah diisi koresponden dengan empat kategori kinerja pelayanan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (X)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,542</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tujuan: Mengukur tingkat efektivitas proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait infrastruktur dan pembangunan kewilayahan agar terwujud kebijakan yang berkualitas dan bermanfaat.</p>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,542	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)																						
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																						
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																						
3	3,0644 – 3,542	76,61 – 88,30	B	Baik																						
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																						
Satuan Pengukuran	Indeks																									
Unit Penanggung jawab	Sekretariat Kementerian Koordinator																									
Penyedia Data	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama																									
Sumber Data	Laporan Kinerja Kemenko Infra																									
Jenis Konsolidasi Periode	<input type="checkbox"/> Sum <input checked="" type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Take Last Known Value																									
Jenis Konsolidasi Lokasi	<input type="checkbox"/> Sum <input checked="" type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data																									

Polarisasi : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Triwulan Semesteran Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	N/A	N/A	3,1
TRIWULAN 2	N/A	N/A	3,1
TRIWULAN 3	N/A	N/A	3,1
TRIWULAN 4	N/A	N/A	3,1

Manual Indikator Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Sasaran Strategis (SS)	:	SS.3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien
Deskripsi SS	:	Tercapainya target pembangunan Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan melalui organisasi dan tata kelola yang baik dengan terlaksananya peningkatan akuntabilitas, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSS.3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Kualitas IK	:	() Ultimate Outcome (x) Intermediate Outcome () Immediate Outcome () Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi:</p> <p>Indikator komposit yang menggambarkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Indikator ini digunakan sebagai ukuran keberhasilan Kemenko Infra dalam melaksanakan kebijakan RB.</p> <p>Instansi penanggung jawab pengukuran adalah Kementerian PANRB, yaitu Deputi RBKUNWAS selaku koordinator dan kementerian/lembaga yang menjadi <i>leading institution</i> kebijakan RB pada tingkat meso.</p> <p>Pelaksanaan RB terbagi menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RB General, yang berfokus kepada perbaikan tata kelola instansi pemerintah; dan 2. RB Tematik, yang berfokus kepada perwujudan dampak RB yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. <p>Pihak-pihak yang terkait (<i>crosscutting</i>) dalam pencapaian Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:</p> <p>RB General</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi <ol style="list-style-type: none"> a. Internal: Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi b. Eksternal: Kementerian PANRB 2. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Internal: Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi b. Eksternal: Kementerian PANRB 3. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) <ol style="list-style-type: none"> a. Internal: Inspektorat b. Eksternal: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 4. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas <ol style="list-style-type: none"> a. Internal: Inspektorat b. Eksternal: Kementerian PANRB 5. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) <ol style="list-style-type: none"> a. Internal: Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama b. Eksternal: Kementerian PANRB 6. Indeks Perencanaan Pembangunan <ol style="list-style-type: none"> a. Internal: Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama b. Eksternal: Bappenas 7. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) <ol style="list-style-type: none"> a. Internal: Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik b. Eksternal: Kementerian PANRB 8. Tingkat Digitalisasi Arsip <ol style="list-style-type: none"> a. Internal : Biro Umum dan Keuangan b. Eksternal : Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) <ol style="list-style-type: none"> a. Internal : Biro Umum dan Keuangan, Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama b. Eksternal : Kementerian Keuangan 10. Indeks Pengelolaan Aset <ol style="list-style-type: none"> a. Internal: Biro Umum dan Keuangan b. Eksternal: Kementerian Keuangan 11. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan <ol style="list-style-type: none"> a. Internal : Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik b. Eksternal : Kementerian PANRB 12. Indeks Kualitas Kebijakan <ol style="list-style-type: none"> a. Internal : Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama b. Eksternal : Lembaga Administrasi Negara (LAN)

13. Indeks Reformasi Hukum
 - a. Internal: Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
 - b. Eksternal: Kementerian Hukum
14. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor
 - a. Internal : Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
 - b. Eksternal : Badan Pusat Statistik (BPS)
15. Indikator Tata Kelola Pengadaan
 - a. Internal : Biro Umum dan Keuangan
 - b. Eksternal : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
16. Indeks Sistem Merit
 - a. Internal: Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
 - b. Eksternal: Badan Kepegawaian Negara (BKN)
17. Indeks Pelayanan Publik
 - a. Internal : Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
 - b. Eksternal : Kementerian PANRB
18. Indeks SPBE
 - a. Internal : Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
 - b. Eksternal : Kementerian PANRB
19. Capaian Prioritas Nasional
 - a. Internal : Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
 - b. Eksternal : Bappenas
20. Capaian IKU
 - a. Internal : Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
 - b. Eksternal : Kementerian PANRB
21. Opini BPK
 - a. Internal: Biro Umum dan Keuangan, Inspektorat
 - b. Eksternal: Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK)
22. Tindak Lanjut Rekomendasi
 - c. Internal : Inspektorat
 - d. Eksternal : Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK)
23. Indeks BerAKHLAK
 - c. Internal : Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
 - d. Eksternal : Kementerian PANRB
24. Survei Penilaian Integritas
 - a. Internal: Inspektorat
 - b. Eksternal: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
25. Survei Kepuasan Masyarakat
 - c. Internal : Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
 - d. Eksternal : Kementerian PANRB

RB Tematik fokus pada tema utama, yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan
2. Peningkatan investasi
3. Mendorong hilirisasi
4. Mendukung ketahanan pangan nasional
5. Mendorong peningkatan kualitas dan akses layanan Kesehatan
6. Mendorong peningkatan akses, kualitas dan mutu layanan Pendidikan

Formula:

Dihitung oleh Kementerian PANRB

Tujuan:

Mengetahui hasil pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Satuan Pengukuran	:	Indeks
Unit Penanggung jawab	:	Sekretariat Kementerian Koordinator
Penyedia Data	:	Kementerian PANRB
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB tahun 2025 dari Kementerian PANRB
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1			-
TRIWULAN 2			-
TRIWULAN 3			-
TRIWULAN 4			91,1

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AYODHIA G.L. KALAKE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
NOMOR 123/S TAHUN 2025 TENTANG
INDIKATOR KINERJA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN

INDIKATOR KINERJA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA
Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN
	Opini BPK atas Laporan Keuangan
	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
	Nilai Kinerja Anggaran
	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Indeks Reformasi Hukum
Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital
	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik

IKSP 1.1

**Manual Indikator Kinerja
Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

Sasaran Program (SP)	:	SP 1. Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima.
Deskripsi SP	:	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau lingkup Setmenko Infra. Dengan adanya pelayanan kesekretariatan yang prima maka akan tercipta suasana kerja yang baik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Kualitas IK	:	<input type="checkbox"/> Ultimate Outcome <input checked="" type="checkbox"/> Intermediate Outcome <input type="checkbox"/> Immediate Outcome <input type="checkbox"/> Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi: Nilai hasil evaluasi KemenPAN RB terhadap pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.</p> <p>Sesuai dengan Permen PANRB nomor 88 tahun 2021, ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perencanaan kinerjab. Pengukuran kinerjac. Pelaporan kinerjad. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal <p>Formula: Laporan Hasil Evaluasi KemenPAN RB, dengan rincian komponen yang dinilai sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perencanaan kinerja (30%)b. Pengukuran kinerja (30%)c. Pelaporan kinerja (15%)d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) <p>Tujuan: Untuk mengetahui sejauh mana penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) di lingkungan Kemenko Infra dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.</p>
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Unit Penanggung jawab	:	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Penyedia Data	:	KemenPAN RB
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun 2025 dari KemenPAN RB
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	-	-	-
TRIWULAN 2	-	-	-
TRIWULAN 3	-	-	-
TRIWULAN 4	85	72,86	85

**Manual Indikator Kinerja
Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

Sasaran Program (SP)	:	SP 1. Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima.
Deskripsi SP	:	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau lingkup Setmenko Infra. Dengan adanya pelayanan Kesekretariatan yang prima maka akan tercipta suasana kerja yang baik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 1.2 Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN
Kualitas IK	:	<input type="checkbox"/> Ultimate Outcome <input checked="" type="checkbox"/> Intermediate Outcome <input type="checkbox"/> Immediate Outcome <input type="checkbox"/> Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi: Penilaian indeks NSPK Manajemen ASN merupakan hasil evaluasi kualitas dan ketaatan dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan Manajemen ASN di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.</p> <p>Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022, penilaian Indeks ini dilakukan melalui 18 elemen penilaian yang masing-masing terdiri dari beberapa indikator yang termuat dalam aplikasi Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN yang terintegrasi dengan SIASN. Selain menggunakan elemen dan indikator tersebut, penilaian dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> hasil pengawasan dan pengendalian di Instansi Pemerintah; dan evaluasi terhadap komitmen dari PPK Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian. <p>Formula: Laporan Hasil Implementasi NSPK Manajemen ASN oleh BKN, dengan kategori hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kategori A (nilai 85,01 – 100,00) dengan Predikat Unggul Kategori B (nilai 70,01 – 85,00) dengan Predikat Baik Kategori C (nilai 55,01 – 70,00) dengan Predikat Cukup Kategori D (nilai 40,01 – 55,00) dengan Predikat Kurang Kategori E (nilai 25,00 – 40,00) dengan Predikat Buruk <p>Tujuan: Untuk mengetahui tingkat penerapan Manajemen ASN di Kemenko Infra dalam rangka menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.</p>
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Unit Penanggung jawab	:	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
Penyedia Data	:	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Sumber Data	:	Hasil Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN dari BKN
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	N/A	N/A	-
TRIWULAN 2	N/A	N/A	-
TRIWULAN 3	N/A	N/A	-
TRIWULAN 4	N/A	N/A	78,60

**Manual Indikator Kinerja
Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

Sasaran Program (SP)	:	SP 1. Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima.
Deskripsi SP	:	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau lingkup Setmenko Infra. Dengan adanya pelayanan Kesekretariatan yang prima maka akan tercipta suasana kerja yang baik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 1.3 Opini BPK atas Laporan Keuangan
Kualitas IK	:	<input type="checkbox"/> Ultimate Outcome <input checked="" type="checkbox"/> Intermediate Outcome <input type="checkbox"/> Immediate Outcome <input type="checkbox"/> Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi: Opini BPK adalah pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Kemenko Infra.</p> <p>Penilaian dari BPK ini menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.</p> <p>Formula: Hasil audit dari BPK RI.</p> <p>Tujuan: Untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Kemenko Infra.</p>
Satuan Pengukuran	:	Jenis Opini
Unit Penanggung jawab	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Biro Umum dan Keuangan ● Inspektorat
Penyedia Data	:	Badan Pemeriksa Keuangan
Sumber Data	:	Laporan Audit BPK
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	-	-	-
TRIWULAN 2	-	-	-
TRIWULAN 3	WTP	WTP	WTP
TRIWULAN 4	-	-	-

**Manual Indikator Kinerja
Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

Sasaran Program (SP)	:	SP 1. Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima.
Deskripsi SP	:	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau lingkup Setmenko Infra. Dengan adanya pelayanan Kesekretariatan yang prima maka akan tercipta suasana kerja yang baik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 1.4 Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
Kualitas IK	:	<input type="checkbox"/> <i>Ultimate Outcome</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Intermediate Outcome</i> <input type="checkbox"/> <i>Immediate Outcome</i> <input type="checkbox"/> Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi: Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Komponen dan periode penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan; Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya. <p>Formula: Laporan Hasil Evaluasi SPIP BPKP, dengan interval skor karakteristik:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rintisan ($1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$) Berkembang ($2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$) Terdefinisi ($3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$) Terkelola dan terukur ($4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$) Optimum ($\geq 4,50$) <p>Tujuan: Untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</p>
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Unit Penanggung jawab	:	<ol style="list-style-type: none"> Inspektorat Biro MKKS
Penyedia Data	:	BPKP
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari BPKP Tahun Laporan 2025.
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	-	-	-
TRIWULAN 2	-	-	-
TRIWULAN 3	-	-	-
TRIWULAN 4	>3	3,5	>3

IKSP 1.5

Manual Indikator Kinerja
Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Sasaran Program (SP) : SP 1. Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima.

Deskripsi SP : Terlaksananya pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau lingkup Setmenko Infra. Dengan adanya pelayanan Kesekretariatan yang prima maka akan tercipta suasana kerja yang baik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Indikator Kinerja (IK) : IKSP 1.5 Nilai Kinerja Anggaran

Kualitas IK : Ultimate Outcome Intermediate Outcome Immediate Outcome Output

Deskripsi IK :

Definisi:
 Penilaian kinerja anggaran merupakan serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas anggaran.

Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran terdiri dari dua variabel perhitungan dengan bobot masing-masing sebesar 50%, yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran.

Nilai evaluasi kinerja anggaran tercantum pada aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Sementara, nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan nilai indikator kinerja atas pelaksanaan anggaran K/L yang tercantum pada sistem informasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Formula:
 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) + IKPA.
 Kategori hasil penilaian NKA berdasarkan PMK No.63 Tahun 2023 sebagai berikut:

Nilai	Kategori
0 s.d. 50	Sangat Kurang
50 s.d. 60	Kurang
60 s.d. 80	Cukup
80 s.d. 90	Baik
90 s.d. 100	Sangat Baik

Tujuan:
 Untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kemenko Marves dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Satuan Pengukuran : Nilai

Unit Penanggung jawab :

- Biro Umum dan Keuangan
- Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Penyedia Data : DJA Kemenkeu

Sumber Data : Aplikasi SMART dan Aplikasi SPAN Kemenkeu

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take last known value

Jenis Konsolidasi Lokasi : Sum Average Raw Data

Polarisasi : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Triwulan Semesteran Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	N/A	N/A	93
TRIWULAN 2	Baik	Baik	-
TRIWULAN 3	N/A	N/A	-
TRIWULAN 4	N/A	N/A	-

**Manual Indikator Kinerja
Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

Sasaran Program (SP)	:	SP 1. Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima.
Deskripsi SP	:	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau lingkup Setmenko Infra. Dengan adanya pelayanan Kesekretariatan yang prima maka akan tercipta suasana kerja yang baik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 1.6 Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kualitas IK	:	<input type="checkbox"/> Ultimate Outcome <input checked="" type="checkbox"/> Intermediate Outcome <input type="checkbox"/> Immediate Outcome <input type="checkbox"/> Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi: Pemantauan dan Evaluasi kinerja pelayanan publik di lingkungan Kemenko Infra berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan, serta aspek inovasi. Nilai indeks ini dikeluarkan oleh KemenPAN & RB berdasarkan penilaian dari beberapa penunjang Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>Formula: Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dari KemenPAN RB.</p> <p>Tujuan: Untuk menilai tingkat penyelenggaraan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik Kemenko Infra.</p>
Satuan Pengukuran	:	Indeks
Unit Penanggung jawab	:	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Penyedia Data	:	Kementerian PANRB
Sumber Data	:	Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	N/A	N/A	-
TRIWULAN 2	N/A	N/A	-
TRIWULAN 3	N/A	N/A	4,52
TRIWULAN 4	N/A	N/A	-

**Manual Indikator Kinerja
Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

Sasaran Program (SP)	:	SP 1. Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima.
Deskripsi SP	:	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau lingkup Setmenko Infra. Dengan adanya pelayanan Kesekretariatan yang prima maka akan tercipta suasana kerja yang baik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 1.7 Indeks Reformasi Hukum
Kualitas IK	:	<input type="checkbox"/> <i>Ultimate Outcome</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Intermediate Outcome</i> <input type="checkbox"/> <i>Immediate Outcome</i> <input type="checkbox"/> Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi: Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi.</p> <p>Penilaian Indeks Reformasi Hukum ini dilakukan oleh seluruh K/L sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian indeks ini dilakukan satu kali dalam setahun oleh Kementerian Hukum dan HAM.</p> <p>Formula: Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada K/L menggunakan 4 (empat) variabel penilaian yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25%)2. Kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) pusat yang berkualitas (bobot 25%)3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil revidi (bobot 30%)4. Penataan <i>database</i> Peraturan Perundang-undangan (bobot 20%) <p>Tujuan: Untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran <i>road map</i> reformasi birokrasi dan memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.</p>
Satuan Pengukuran	:	Indeks
Unit Penanggung jawab	:	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
Penyedia Data	:	Kementerian Hukum dan HAM
Sumber Data	:	Surat Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data

:

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	-	-	-
TRIWULAN 2	-	-	-
TRIWULAN 3	-	-	-
TRIWULAN 4	AA	AA	A

**Manual Indikator Kinerja
Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

Sasaran Program (SP)	:	SP 2. Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik.
Deskripsi SP	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya berbasis elektronik yang terpadu.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 2.1 Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital
Kualitas IK	:	<input type="checkbox"/> Ultimate Outcome <input checked="" type="checkbox"/> Intermediate Outcome <input type="checkbox"/> Immediate Outcome <input type="checkbox"/> Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi: Capaian Kinerja Pemerintah Digital tahun 2025 menggunakan Indeks SPBE dengan mekanisme penilaian mandiri dan penilaian dokumen.</p> <p>Indeks SPBE adalah ukuran tingkat kematangan penerapan SPBE yang mencakup Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, dan dapat dilanjutkan dengan Penilaian Visitasi berdasarkan Permenpan tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Struktur penilaian tingkat kematangan SPBE terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domain area penerapan SPBE: <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Internal SPBE; b. Tata Kelola SPBE; c. Manajemen SPBE; d. Layanan SPBE. 2. Aspek area spesifik penerapan SPBE: <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE; b. Perencanaan Strategis SPBE; c. Teknologi Informasi dan Komunikasi; d. Penyelenggara SPBE; e. Penerapan Manajemen SPBE; f. Pelaksanaan Audit TIK; g. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; h. Layanan Publik Berbasis Elektronik. 3. 47 Indikator penerapan SPBE. <p>Formula: Indeks SPBE dari Kemen PAN RB. Sesuai dengan Permenpan RB No. 59 tahun 2020, dan Pedmenpan RB No. 6 tahun 2023.</p> <p>Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel dan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta mewujudkan system pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.</p>
Satuan Pengukuran	:	Persentase
Unit Penanggung jawab	:	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Penyedia Data	:	Kementerian PANRB
Sumber Data	:	Nilai Indeks SPBE Kementerian PANRB
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	-	-	-
TRIWULAN 2	-	-	-
TRIWULAN 3	-	-	-
TRIWULAN 4	4	3,92	78%

**Manual Indikator Kinerja
Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

Sasaran Program (SP)	:	SP 2. Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik.
Deskripsi SP	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya berbasis elektronik yang terpadu.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 2.2 Nilai JDIH Nasional
Kualitas IK	:	<input type="checkbox"/> Ultimate Outcome <input checked="" type="checkbox"/> Intermediate Outcome <input type="checkbox"/> Immediate Outcome <input type="checkbox"/> Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi:</p> <p>Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen dan informasi hukum</p> <p>Dalam menetapkan Pengelola JDIH terbaik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum menetapkan 6 (Enam) aspek yang menjadi kriteria penilaian ditambah dengan Aspek Pengembangan JDIH (Promosi, Penguatan Organisasi dan Inovasi) yang dilakukan oleh anggota JDIH. Adapun 6 (enam) aspek dimaksud yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Organisasi 2. Aspek Sumber Daya Manusia 3. Aspek Koleksi Dokumen Hukum 4. Aspek Teknis Pengelolaan 5. Aspek Sarana Prasarana 6. Aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikas <p>Formula:</p> <p>Nilai JDIH Nasional oleh Kementerian Hukum, dengan peringkat atau kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori <i>Catur Dandan</i>*, adalah anggota JDIH yang memperoleh nilai 0 – 65; 2. Kategori <i>Tri Buntara</i>*, adalah anggota JDIH yang memperoleh nilai 66 – 75; 3. Kategori <i>Dwi Tungga</i>*, adalah anggota JDIH yang memperoleh nilai 76 – 85; 4. Kategori <i>Eka Acalapati</i>*, adalah anggota JDIH yang memperoleh nilai 86 – 100. <p>Tujuan:</p> <p>Meningkatkan layanan dokumentasi dan informasi hukum kepada publik.</p>
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Unit Penanggung jawab	:	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
Penyedia Data	:	Kementerian Hukum dan HAM
Sumber Data	:	Keputusan Menteri Hukum tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Anggota JDIH
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input checked="" type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data

:

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	-	-	-
TRIWULAN 2	-	-	-
TRIWULAN 3	-	-	-
TRIWULAN 4			Eka Acalapati

**Manual Indikator Kinerja
Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

Sasaran Program (SP)	:	SP 2. Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik.
Deskripsi SP	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya berbasis elektronik yang terpadu.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 3.1 Nilai Keterbukaan Informasi Publik
Kualitas IK	:	<input type="checkbox"/> Ultimate Outcome <input checked="" type="checkbox"/> Intermediate Outcome <input type="checkbox"/> Immediate Outcome <input type="checkbox"/> Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi: Keterbukaan Informasi Publik adalah ukuran tingkat kepuasan pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) setelah melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Komponen penilaian keterbukaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, digitalisasi, barang dan jasa.</p> <p>Formulasi: Keterbukaan Informasi Publik dihasilkan berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) diberikan dengan kualifikasi: 1. Informatif dengan nilai 90 sampai dengan 100; 2. Menuju Informatif dengan nilai 80 sampai dengan 89,9; 3. Cukup Informatif dengan nilai 60 sampai dengan 79,9; 4. Kurang Informatif dengan nilai 40 sampai dengan 59,9; dan 5. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.</p> <p>Nilai tersebut diperoleh melalui tahapan pengisian lembar evaluasi diri oleh Badan Publik; verifikasi data evaluasi diri oleh Komisi Informasi; presentasi oleh Badan Publik; dan penilaian oleh Komisi Informasi.</p> <p>Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel dan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.</p>
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Unit Penanggung jawab	:	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Penyedia Data	:	Komisi Informasi Pusat
Sumber Data	:	Dokumen Nilai keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP)
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data

:

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	-	-	-
TRIWULAN 2	-	-	-
TRIWULAN 3	-	-	-
TRIWULAN 4	-	-	Informatif

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AYODHIA G.L. KALAKE

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
NOMOR 123/S TAHUN 2025 TENTANG
INDIKATOR KINERJA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN

INDIKATOR KINERJA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH,
AGRARIA, DAN TATA RUANG

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA
Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Merata dan Berkelanjutan	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah, Agraria, Dan Tata Ruang
Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Efektif dan Efisien	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritasi (PMPZI) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

**Manual Indikator Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang**

Sasaran Program (SP)	:	SP.1 Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Merata dan Berkelanjutan
Deskripsi SP	:	Sasaran ini bertujuan untuk mendorong pembangunan wilayah yang adil dan merata, melalui penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan ruang dan agraria. Fokus utamanya adalah mengurangi kesenjangan antar daerah, mempercepat reforma agraria, serta memastikan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berbasis data spasial. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 1.1 Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah, Agraria, Dan Tata Ruang
Kualitas IK	:	(x) <i>Ultimate Outcome</i> () <i>Intermediate Outcome</i> () <i>Immediate Outcome</i> () Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi:</p> <p>Indikator ini mengukur tingkat pencapaian target pembangunan di bidang pemerataan Pembangunan wilayah, agrarian, dan tata ruang yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional, baik menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP).</p> <p>Indikator ini menjadi tolok ukur efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang yang berkualitas. Pencapaiannya mencerminkan sejauh mana pembangunan sektor pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang berjalan sesuai rencana.</p> <p>Indikator pembangunan yang menjadi target pada Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:</p> <p>Pemerataan Pembangunan Wilayah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Williamson Indeks Williamson merupakan satu instrumen dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Indeks Williamson secara garis besar mengukur seberapa kesenjangan yang ada pada suatu pembangunan pada suatu wilayah. Analisis Indeks Williamson bertujuan untuk menyediakan informasi dalam rangka mengevaluasi kesenjangan ekonomi antar Provinsi di Indonesia. <ul style="list-style-type: none"> ○ Baseline 2024: 0,709 ○ Target 2025: 0,703 ○ Target 2029: 0,679 2. Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi Indeks komposit yang bertujuan untuk menetapkan status/indeks perkembangan Satuan Permukiman (SP), Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), Kawasan Perkotaan Baru (KPB), dan kawasan transmigrasi, serta memberikan informasi mengenai inisiatif masyarakat, strategi pembangunan dan pengembangan, serta kebutuhan intervensi yang lebih akurat dalam rangka mewujudkan kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing. (definisi masih mengacu pada Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi) <ul style="list-style-type: none"> ○ Baseline 2024: 0,425 ○ Target 2025: 0,450 ○ Target 2029: 0,550 3. Indeks Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pulau-pulau Kecil, dan Daerah Tertinggal <ul style="list-style-type: none"> ● Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IPPK) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil. IPPK ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pulau. <ul style="list-style-type: none"> ○ Baseline 2024: 0,45 ○ Target 2025: 0,49 ○ Target 2029: 0,61 ● Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju <ul style="list-style-type: none"> ○ Baseline 2024: indikator baru ○ Target 2025: 16,67 ○ Target 2029: 56,67 ● Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan <ul style="list-style-type: none"> ○ Baseline 2024: 0,52 ○ Target 2025: 0,56

- Target 2029: 0,72

Agraria:

4. Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah
Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah merupakan indikator yang menunjukkan pola distribusi luas pemilikan tanah. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana nilai 0 menunjukkan ketiadaan ketidaksetaraan dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan maksimum. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketimpangan distribusi pemilikan tanah, sedangkan semakin rendah nilai Indeks Gini, semakin merata distribusi pemilikan tanah. Penurunan nilai Indeks Gini mencerminkan penurunan tingkat ketimpangan pemilikan tanah.
 - Baseline 2024: 0,0057
 - Target 2025: 0,002
 - Target 2029: 0,0227
5. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat penerima Reforma Agraria
Peningkatan Pendapatan Perkapita Penerima Reforma Agraria, merupakan Indikator yang mengukur peningkatan pendapatan per kapita bagi individu yang menerima manfaat dari pelaksanaan Reforma Agraria, dengan membandingkan pendapatan mereka setelah program Reforma Agraria dengan pendapatan awal sebelum mereka menerima manfaat dari program tersebut. Sesuai dengan TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres Nomor 62 Tahun 2023) bahwa Reforma Agraria mencakup kegiatan penataan aset dan penataan akses, bertujuan untuk menyusun kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, dengan tujuan mencapai kepastian hukum, perlindungan, keadilan, dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
 - Baseline 2024: 4,96
 - Target 2025: 14,98
 - Target 2029: 53,89

Tata Ruang:

6. Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal
Indeks kepatuhan ruang yang optimal adalah sebuah ukuran yang mencerminkan sejauh mana pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Indeks ini menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas rencana tata ruang dalam mengendalikan pemanfaatan ruang dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
 - Baseline 2024: 50
 - Target 2025: 52
 - Target 2029: 60
7. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir
Indeks kepatuhan ruang yang optimal adalah sebuah ukuran yang mencerminkan sejauh mana pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Indeks ini menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas rencana tata ruang dalam mengendalikan pemanfaatan ruang dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
 - Baseline 2024: 91,17
 - Target 2025: 13,6
 - Target 2029: 100

KL penyedia data terkait isu diatas antara lain:

1. Badan Pusat Statistik
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3. Kementerian Transmigrasi
4. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Bagian Atas Formulir
6. Bagian Bawah Formulir
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan

Formula:

$$\frac{\sum \text{Persentase Capaian Indikator Pembangunan yang Diselesaikan}}{\sum \text{Indikator Pembangunan yang Ditugaskan untuk Diselesaikan}} \times 100\%$$

Tujuan:

Mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan dalam meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang

Satuan Pengukuran

: Persentase

Unit Penanggung jawab

: Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

- Penyedia Data** : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
- Sumber Data** : Laporan Hasil Perhitungan
- Jenis Konsolidasi Periode** : Sum Average Take last known value
- Jenis Konsolidasi Lokasi** : Sum Average Raw Data
- Polarisasi** : Maximize Minimize Stabilize
- Periode Pelaporan** : Triwulan Semesteran Tahunan
- Tabel Data** :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	N/A	N/A	-
TRIWULAN 2	N/A	N/A	-
TRIWULAN 3	N/A	N/A	-
TRIWULAN 4	N/A	N/A	100%

**Manual Indikator Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang**

Sasaran Program (SP)	:	SP.2 Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas
Deskripsi SP	:	Terselesainya program prioritas dan isu strategis melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang efektif dan berkualitas guna mendukung pencapaian target di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 2.1 Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
Kualitas IK	:	() <i>Ultimate Outcome</i> () <i>Intermediate Outcome</i> (x) <i>Immediate Outcome</i> () Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi:</p> <p>Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang akan diselesaikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. One Spatial Planning Policy (OSPP) OSPP atau Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang adalah pendekatan kebijakan tata ruang yang mengintegrasikan seluruh rencana tata ruang di berbagai bidang (darat, laut, udara dan ruang dalam bumi) ke dalam satu dokumen dan sistem perencanaan yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan efektivitas perencanaan tata ruang dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penyelesaian isu ini mendukung pencapaian indikator kinerja tata ruang, yakni Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal dan Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir.2. Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) ILASPP adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk memperkuat penataan ruang berbasis iklim, meningkatkan keamanan kepemilikan tanah, dan memperbaiki administrasi pertanahan di Indonesia. Penyelesaian isu ini mendukung pencapaian indikator kinerja agrarian dan tata ruang, yakni Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah, Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat penerima Reforma Agraria, Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal, dan Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir.3. Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta Merupakan serangkaian upaya untuk mengembangkan wilayah pesisir utara Jakarta yang meliputi reklamasi pantai, pembangunan tanggul laut, dan penataan kawasan yang bertujuan untuk mengatasi banjir rob, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Isu ini juga mencakup pembangunan infrastruktur seperti tanggul pengaman pantai dan kawasan ekonomi khusus (KEK) serta penataan ruang yang berkelanjutan. Penyelesaian isu ini mendukung pencapaian indikator kinerja pemerataan Pembangunan wilayah dan tata ruang, yakni Indeks Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Terluar, dan Daerah Tertinggal dan Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir.4. Pengembangan Kawasan Kerta Jati dan Rebana Upaya untuk mengembangkan wilayah Jawa Barat bagian utara dan timur dengan tujuan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang difokuskan pada integrasi infrastruktur, pengembangan industri, pariwisata dan agribisnis untuk meningkatkan perekonomian daerah, meningkatkan investasi, mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah utara dan selatan jawa barat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelesaian isu ini mendukung pencapaian indikator kinerja pemerataan pembangunan wilayah dan tata ruang, yakni Indeks Williamson dan Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal.5. Blue Economy Konsep pemanfaatan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sambil tetap menjaga kesehatan

ekosistem laut dan mengatasi tantangan lingkungan seperti perubahan iklim dan polusi. Penyelesaian isu ini mendukung pencapaian indikator kinerja pemerataan pembangunan wilayah dan tata ruang, yakni Indeks Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Terluar, dan Daerah Tertinggal dan Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir.

6. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional

Upaya pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah lain yang kurang padat penduduknya, dengan tujuan pemerataan penduduk, pembangunan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah tujuan transmigrasi. Program ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah transmigrasi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Penyelesaian isu ini mendukung pencapaian indikator kinerja pemerataan pembangunan wilayah dan tata ruang, yakni Indeks Williamson, Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi dan Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal.

7. Pengembangan Kawasan Desa

Upaya terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya alam dan potensi lokal, serta pembangunan infrastruktur yang memadai dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Penyelesaian isu ini mendukung pencapaian indikator kinerja pemerataan pembangunan wilayah dan tata ruang, yakni Indeks Williamson dan Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal.

8. Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara

Upaya terkoordinasi untuk mempercepat pembangunan wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas terbatas guna mengurangi kesenjangan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kedaulatan wilayah, serta menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelesaian isu ini mendukung pencapaian indikator kinerja pemerataan Pembangunan wilayah dan tata ruang, yakni Indeks Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Terluar, dan Daerah Tertinggal dan Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir.

Formula:

$$\frac{\sum \text{Isu Strategis yang Diselesaikan}}{\sum \text{Isu Strategis yang Ditugaskan untuk Diselesaikan}} \times 100\%$$

No	Isu Strategis	Target Keberhasilan
1	<i>One Spatial Planning Policy (OSPP)</i>	Penyusunan Peraturan Presiden <i>One Spatial Planning Policy (OSPP)</i>
2	<i>Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)</i>	Terlaksananya <i>Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)</i> 1. Pembentukan Project Management Unit (ATR/BPN), 2. Pembentukan Project Implementation Unit (Dagri, BIG, ATR) 3. Pendaftaran PTSL 4. Sosialisasi tanah ulayat 5. Peta Dasar skala besar 1:5000 urban Pulau Sulawesi
3	Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta	Rekomendasi kebijakan penataan ruang dan agraria dalam mendukung pembangunan <i>giant sea wall</i>
4	Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana	Tersedianya Rumusan Kebijakan Strategis untuk Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana
5	<i>Blue Economy</i>	1. RTR KSN Sabang 2. RZKW Laut Barat Sumatera 3. Rumusan Kelembagaan KPBPB Sabang 4. Monitoring dan Koordinasi
6	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional	Rumusan Kebijakan Transformasi Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional

7	Pengembangan Kawasan Desa	Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan dan Penguatan Daya Saing Kawasan Perdesaan
8	Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara	Terlaksananya Sinkronisasi dan Koordinasi Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan serta Pengendalian Kebijakan di Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal

Tujuan:
 Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terkait rekomendasi kebijakan di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang

Satuan Pengukuran :

Unit Penanggung jawab :
 Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang:
 1. Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria
 2. Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I
 3. Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II
 4. Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi
 5. Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal

Penyedia Data :

Sumber Data :

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take last known value

Jenis Konsolidasi Lokasi : Sum Average Raw Data

Polarisasi : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Triwulan Semesteran Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN 1	N/A	N/A	25%
TRIWULAN 2	N/A	N/A	50%
TRIWULAN 3	N/A	N/A	75%
TRIWULAN 4	N/A	N/A	100%

**Manual Indikator Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Dan Tata Ruang**

Sasaran Program (SP)	:	SP.2 Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas																									
Deskripsi SP	:	Sasaran ini menunjukkan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang di Kementerian/Lembaga terkait. Keberhasilan pelaksanaan tugas ini akan mendukung peningkatan pemerataan pembangunan nasional.																									
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 2.2 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang																									
Kualitas IKU	:	() <i>Ultimate Outcome</i> () <i>Intermediate Outcome</i> (x) <i>Immediate Outcome</i> () Output																									
Deskripsi IKU	:	<p>Definisi:</p> <p>Hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dengan melakukan survei kepuasan pelayanan ke kementerian/lembaga/<i>stakeholders</i> terkait yang berada di bawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.</p> <p>Survei dilakukan menggunakan <i>google form</i> dengan skala likert 1-4 dan disampaikan dalam kegiatan koordinasi yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.</p> <p>Formula:</p> <p>Formula perhitungan mengacu pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (X)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,542</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tujuan:</p> <p>Untuk mengukur tingkat efektivitas proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.</p>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,542	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)																							
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																							
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																							
3	3,0644 – 3,542	76,61 – 88,30	B	Baik																							
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																							
Satuan Pengukuran	:	Persentase																									
Unit Penanggung jawab	:	<p>Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal 																									
Penyedia Data	:	Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang																									
Sumber Data	:	Laporan Indeks Kepuasan Layanan																									
Jenis Konsolidasi Periode	:	() Sum (x) Average () Take last known value																									

Jenis Konsolidasi Lokasi : Sum Average Raw Data

Polarisasi : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Triwulan Semesteran Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN 1	N/A	N/A	3,1
TRIWULAN 2	N/A	N/A	3,1
TRIWULAN 3	N/A	N/A	3,1
TRIWULAN 4	N/A	N/A	3,1

**Manual Indikator Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Dan Tata Ruang**

Sasaran Program (SP)	:	SP.3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang efektif dan efisien
Deskripsi SP	:	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang adalah kondisi dimana implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan secara efektif melalui serangkaian aktivitas seperti komitmen pimpinan, penyusunan rencana aksi, penyusunan tim kerja, monitoring dan evaluasi hingga penilaian mandiri.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 3.1 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritasi (PMPZI) Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
Kualitas IK	:	<input type="checkbox"/> <i>Ultimate Outcome</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Intermediate Outcome</i> <input type="checkbox"/> <i>Immediate Outcome</i> <input type="checkbox"/> Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi: Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang adalah nilai atas capaian pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkup bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE).</p> <p>Formula: Penilaian Inspektorat terhadap implementasi Zona Integritas berdasarkan enam Komponen Pengungkit yaitu: 1. Manajemen Perubahan, 2. Penataan Tatalaksana, 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 4. Penguatan Akuntabilitas 5. Penguatan Pengawasan, dan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>Serta dua Komponen Hasil yaitu: 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel 2. Pelayanan Publik yang Prima</p> <p>Adapun pihak yang terkait erat dalam pencapaian Indikator Kinerja (<i>crosscutting</i>) ini yaitu: 1. Internal: Sekretariat Kemenko Marves 2. Eksternal: Kementerian PANRB, BPKP</p> <p>Tujuan: Menilai perkembangan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.</p>
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Unit Penanggung jawab	:	Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang
Penyedia Data	:	1. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang 2. Inspektorat
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi PMPZI dari Inspektorat
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize

Periode Pelaporan : Triwulan Semesteran Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	-	-	-
TRIWULAN 2	-	-	-
TRIWULAN 3	-	-	-
TRIWULAN 4	85	81.75	91

**Manual Indikator Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Dan Tata Ruang**

Sasaran Program (SP)	:	SP.3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang efektif dan efisien
Deskripsi SP	:	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang adalah kondisi dimana implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan secara efektif melalui serangkaian aktivitas seperti komitmen pimpinan, penyusunan rencana aksi, penyusunan tim kerja, monitoring dan evaluasi hingga penilaian mandiri.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 3.2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
Kualitas IK	:	<input type="checkbox"/> <i>Ultimate Outcome</i> <input type="checkbox"/> <i>Intermediate Outcome</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Immediate Outcome</i> <input type="checkbox"/> Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi: Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang adalah nilai atas capaian pelaksanaan SAKIP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE).</p> <p>Formula: Penilaian Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang meliputi: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal</p> <p>Adapun pihak yang terkait dalam pencapaian Indikator Kinerja (<i>crosscutting</i>) ini yaitu: 1. Internal: Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Sekretariat Kemenko Marves dan Inspektorat 2. Eksternal: Kementerian PAN RB</p> <p>Tujuan: Menilai perkembangan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.</p>
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Unit Penanggung jawab	:	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
Penyedia Data	:	1. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang 2. Inspektorat
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input checked="" type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	-	-	-
TRIWULAN 2	-	-	-
TRIWULAN 3	-	-	-
TRIWULAN 4	76	78.80	91

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AYODHIA G.L. KALAKE

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN NOMOR
123/S TAHUN 2025 TENTANG INDIKATOR
KINERJA LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

INDIKATOR KINERJA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KONEKTIVITAS

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA
Terwujudnya Konektivitas Transportasi Nasional yang Merata dan Berkelanjutan	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Konektivitas
Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan yang Efektif dan Efisien bidang Konektivitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Konektivitas
	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Konektivitas
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Konektivitas yang efektif dan efisien	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritasi (PMPZI) Deputi Bidang Konektivitas
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Konektivitas

Manual Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas

Sasaran Program (SP)	:	SP.1 Terwujudnya Konektivitas Transportasi Nasional yang Merata dan Berkelanjutan																								
Deskripsi SP	:	<p>Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan aksesibilitas sistem transportasi guna mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang, serta pemerataan pembangunan wilayah. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi, integrasi antarmoda, optimalisasi jaringan logistik, serta penerapan kebijakan yang mendorong efektivitas dan efisiensi transportasi nasional.</p> <p>Keberhasilan peningkatan konektivitas transportasi nasional diukur melalui pencapaian indikator pembangunan sektor transportasi yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan pemerintah. Dengan konektivitas yang lebih baik, diharapkan pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional, serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.</p>																								
Indikator Kinerja (IK)	:	SP 1.1 Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Konektivitas																								
Kualitas IK	:	(x) <i>Ultimate Outcome</i> () <i>Intermediate Outcome</i> () <i>Immediate Outcome</i> () Output																								
Deskripsi IK	:	<p>Definisi:</p> <p>Indikator ini mengukur tingkat pencapaian target pembangunan di sektor konektivitas yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional, baik menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP). Persentase capaian dihitung berdasarkan realisasi terhadap target yang direncanakan dalam pembangunan infrastruktur transportasi, integrasi antarmoda, peningkatan aksesibilitas wilayah, serta optimalisasi sistem logistik nasional.</p> <p>Indikator ini menjadi tolok ukur efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan dalam meningkatkan konektivitas nasional. Pencapaiannya mencerminkan sejauh mana pembangunan sektor transportasi berjalan sesuai rencana guna mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran arus barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.</p> <p>Indikator pembangunan yang menjadi target pada Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">PN</th> <th style="width: 30%;">Program Prioritas (PP)</th> <th style="width: 45%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="9" style="text-align: center; vertical-align: top;">3</td> <td rowspan="9" style="vertical-align: top;">PP. Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda</td> <td>1. Jumlah Perjalanan Kereta Api</td> <td style="text-align: center;">0,92 juta perjalanan</td> </tr> <tr> <td>2. <i>On Time Performance</i> Penerbangan</td> <td style="text-align: center;">80%</td> </tr> <tr> <td>3. Peningkatan Volume Angkutan Laut</td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan</td> <td style="text-align: center;">850 juta penumpang</td> </tr> <tr> <td>5. Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan Jalan</td> <td style="text-align: center;">65%</td> </tr> <tr> <td>6. Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten</td> <td style="text-align: center;">85,5%</td> </tr> <tr> <td>7. Volume angkutan penyeberangan</td> <td style="text-align: center;">11,6 juta kendaraan</td> </tr> <tr> <td>8. Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api</td> <td style="text-align: center;">519 juta penumpang</td> </tr> <tr> <td>9. Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jaringan Jalan Nasional</td> <td style="text-align: center;">1,90 jam/100 km</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pihak-pihak yang terkait (<i>crosscutting</i>) dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Daerah.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Capaian Realisasi Indikator Pembangunan yang Dikoordinasikan}}{\text{Jumlah Indikator Pembangunan yang Dikoordinasikan}} \times 100\%$	PN	Program Prioritas (PP)	Indikator	Target 2025	3	PP. Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda	1. Jumlah Perjalanan Kereta Api	0,92 juta perjalanan	2. <i>On Time Performance</i> Penerbangan	80%	3. Peningkatan Volume Angkutan Laut	10%	4. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan	850 juta penumpang	5. Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan Jalan	65%	6. Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	85,5%	7. Volume angkutan penyeberangan	11,6 juta kendaraan	8. Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	519 juta penumpang	9. Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jaringan Jalan Nasional	1,90 jam/100 km
PN	Program Prioritas (PP)	Indikator	Target 2025																							
3	PP. Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda	1. Jumlah Perjalanan Kereta Api	0,92 juta perjalanan																							
		2. <i>On Time Performance</i> Penerbangan	80%																							
		3. Peningkatan Volume Angkutan Laut	10%																							
		4. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan	850 juta penumpang																							
		5. Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan Jalan	65%																							
		6. Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	85,5%																							
		7. Volume angkutan penyeberangan	11,6 juta kendaraan																							
		8. Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	519 juta penumpang																							
		9. Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jaringan Jalan Nasional	1,90 jam/100 km																							

	Tujuan: Mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan dalam meningkatkan konektivitas nasional
Satuan Pengukuran	: Persentase
Unit Penanggung jawab	: Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas
Penyedia Data	: 1. Kementerian Perhubungan 2. BPS 3. Bappenas
Sumber Data	: 1. Laporan
Jenis Konsolidasi Periode	: <input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	: <input type="checkbox"/> Sum <input checked="" type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
Tabel Data	:

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	N/A	N/A	-
TRIWULAN 2	N/A	N/A	-
TRIWULAN 3	N/A	N/A	-
TRIWULAN 4	N/A	N/A	100%

Manual Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Sasaran Program (SP)	:	SP 2 Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Yang Efektif dan Efisien di Bidang Konektivitas
Deskripsi SP	:	Sasaran ini menunjukkan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang konektivitas di Kementerian/Lembaga terkait. Keberhasilan pelaksanaan tugas ini akan mendukung peningkatan konektivitas transportasi nasional.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 2.1 Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Konektivitas
Kualitas IK	:	() <i>Ultimate Outcome</i> () <i>Intermediate Outcome</i> (x) <i>Immediate Outcome</i> () Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi:</p> <p>Indikator ini mengukur penyelesaian isu strategis yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas. Isu strategis merupakan bagian dari program strategis pemerintah dan penugasan dari Menko.</p> <p>Adapun isu strategis Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas pada 2025 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Konektivitas Penunjang Logistik2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Regulasi Kereta Api Berkecepatan Tinggi3. Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Penanganan Angkutan <i>Over Dimension Over Loading</i> (ODOL)4. Koordinasi dan Sinkronisasi Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF)6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan SDM Bidang Transportasi7. Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah Isu Strategis yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Isu Strategis yang Ditugaskan untuk Diselesaikan}} \times 100\%$ <ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Konektivitas Penunjang Logistik Deskripsi Kegiatan Program tol laut yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, merupakan upaya pemerintah untuk membangun sistem transportasi laut nasional yang terjadwal, teratur, dan terjangkau. Pelaksanaan program tol laut merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan. Program ini bertujuan untuk menurunkan disparitas harga di berbagai daerah, memperkuat jaringan konektivitas antar wilayah, dan mendukung distribusi barang kebutuhan pokok, serta logistik nasional secara efisien, terutama ke daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan (3TP). Program tol laut juga dimaksudkan untuk mendorong pemerataan ekonomi, menurunkan ketimpangan wilayah, serta memperkuat integrasi sistem transportasi multimoda antara laut, darat, dan udara. Keberhasilan program ini memerlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, operator pelabuhan, dan pelaku usaha logistik serta pengguna jasa. Salah satu yang menjadi fokus program ini adalah distribusi logistik ke Kawasan Timur Indonesia (KTI), karena seringkali terjadi kelangkaan barang dan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan daerah lain. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan fiskal, armada kapal, infrastruktur pelabuhan, ketepatan waktu, dan volume muatan balik. Target tahun 2025<ol style="list-style-type: none">a. Peningkatan jumlah trayek dan kapal tol laut sebelumnya 37 menjadi 39 trayek dan kapal tol laut tahun 2025b. Peningkatan capaian muatan balik 30% pada triwulan IV dari sebelumnya 27% pada triwulan ITarget Per Triwulan<ul style="list-style-type: none">• TW.1 Rapat koordinasi kementerian/Lembaga dan para pemangku kepentingan lainnya mengenai permasalahan kendala terhadap layanan angkutan barang di laut (tol laut) dan laporan data trayek dan muatan kapal tol laut.• TW.2 Melaksanakan koordinasi dan monitoring (kunjungan lapangan) bersama kementerian/lembaga, evaluasi dan identifikasi kendala hambatan program tol laut untuk trayek dan muatan

- TW.3 Melaksanakan koordinasi bersama kementerian/lembaga untuk mendorong peningkatan muatan balik tol laut
- TW.4 Peningkatan angkutan laut (tol Laut) untuk muatan balik mencapai 30%

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Regulasi Kereta Api Berkecepatan Tinggi

Deskripsi: Mendorong percepatan pembentukan regulasi Kereta Api Berkecepatan Tinggi melalui RPP tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi dan RPerpres tentang Komite Kereta Api Cepat.

Target Keberhasilan: Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kereta Api Cepat sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Kereta Api Cepat

Target per triwulan:

Triwulan I: Identifikasi pemangku kepentingan dan masalah terkait penyusunan RPP tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi

Triwulan II: Penyusunan draf awal RPP tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi bersama pemangku kepentingan terkait

Triwulan III: (i) penyusunan surat izin prakarsa RPP tentang penyelenggaraan kereta api kecepatan tinggi dan RPerpres tentang komite kereta api cepat, (ii) koordinasi lebih lanjut penyusunan RPP, dan (iii) penyusunan awal draf Rperpres

Triwulan IV: Finalisasi dokumen RPP dan RPerpres

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Penanganan Angkutan *Over Dimension Over Loading* (ODOL)

Deskripsi singkat: Mendorong percepatan penanganan kendaraan lebih dimensi lebih muatan melalui implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) yang termuat pada RPerpres Penguatan Logistik Nasional.

Target keberhasilan tahun 2025: terselesainya 18 keluaran dari 47 keluaran yang ada di dalam RAN Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi Lebih Muatan yang termuat pada RPerpres Penguatan Logistik Nasional.

Target per triwulan:

Triwulan I: Koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait dalam identifikasi permasalahan penanganan kendaraan lebih dimensi lebih muatan.

Triwulan II: Tersusunnya RAN Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi Lebih Muatan yang termuat pada RPerpres Penguatan Logistik Nasional.

Triwulan III: (i) tersusunnya laporan interim kajian pengukuran dampak penerapan kebijakan Zero ODOL terhadap perekonomian, biaya logistik, dan inflasi untuk 18 komoditas Bapokting dan 5 sektor terkait di Provinsi DK Jakarta dan Jawa Barat, dan (ii) pengembangan sistem ticketing terintegrasi angkutan penyeberangan yang dilengkapi dengan e-manifest angkutan barang.

Triwulan IV: (i) tersedianya mekanisme pendaftaran ulang untuk seluruh kendaraan angkutan barang yang melakukan penyesuaian dimensi sebagaimana ketentuan, (ii) peningkatan efektivitas (persentase) pada pengawasan, pencatatan, dan penindakan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan, (iii) penambahan unit pada alat ukur multi dimensi, tera ulang, dan penambahan fasilitas penimbangan di ruas tol, jalan nasional, pelabuhan, dan kawasan industri, (iv) terlaksananya tera ulang fasilitas penimbangan di lokasi pilot project (Jawa Barat dan DK Jakarta, serta pada pelabuhan Tanjung Priok, Bakauheni, Merak, Ketapang, dan Gilimanuk), (v) tercapainya kecepatan minimum 60 km/jam pada ruas jalan tol untuk angkutan barang, (vi) tersedianya aturan turunan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2024 mengenai Jalan Tol pasal 109 Ayat (2), (vii) penerapan pengaturan kelas jalan dan koridor logistik dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DK Jakarta pada 2025, (viii) penyusunan studi komprehensif mengenai perbandingan tarif angkutan kereta dengan angkutan barang truk berdasarkan wilayah, (ix) penyusunan kajian mengenai rute penyeberangan khusus logistik Short Sea Shipping termasuk RO-RO di jalur Pantai Utara (Pantura), Pantai Selatan (Pansela), dan jalur Sumatera, (x) tersusunnya laporan akhir kajian pengukuran dampak penerapan kebijakan Zero ODOL terhadap perekonomian, biaya logistik, dan inflasi untuk 18 komoditas Bapokting dan 5 sektor terkait di Provinsi DK Jakarta dan Jawa Barat, (xi) dokumen akhir kajian dampak kerugian ekonomi sosial yang ditimbulkan oleh kendaraan ODOL, terutama kecelakaan akibat ODOL yang menyebabkan hilangnya nyawa, (xii) monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan jumlah pengemudi logistik yang terdaftar dalam jaminan sosial perlindungan ketenagakerjaan, (xiii) terlaksananya sertifikasi dan pelatihan SDM pengemudi logistik yang berkualitas, (xiv) pemberian lisensi kepada korporasi/koperasi yang mendorong korporatisasi angkutan logistik bagi pengusaha perorangan, (xv) terlaksananya evaluasi atas regulasi yang mengatur tentang pengenaan pajak dan pungutan lainnya terkait kendaraan bermotor di daerah, (xvi)

terlaksananya evaluasi atas ketentuan tarif angkutan barang, dan (xvii) terbentuknya komite terkait percepatan pengembangan konektivitas nasional.

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni

- a. Tersedianya studi perencanaan integrasi antarmoda kawasan pelabuhan penyeberangan Bakauheni Harbour City (BHC) (Bagian Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Merak Bakauheni)
- b. Penyerahan Kewenangan Tugas Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan Penyeberangan dari Ditjen Perhubungan Darat ke Ditjen Perhubungan Laut pada 52 KSOP

5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF)

Deskripsi: Mendorong percepatan pengembangan SAF Indonesia melalui pembentukan Tim Nasional (Timnas) lintas kementerian/lembaga, sehingga target penggunaan SAF sebesar 1% pada 2027 dapat tercapai.

Target Keberhasilan Tahun 2025: Tersusunnya Surat Keputusan (SK) Menko terkait Tim Nasional Percepatan Pengembangan Industri Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan di Indonesia

Target Triwulan

Triwulan I: Rapat dengan K/L terkait dan para pemangku kepentingan lainnya mengenai rencana penyusunan Tim Nasional Percepatan Pengembangan Industri Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan Indonesia

Triwulan II: Audiensi dengan berbagai K/L terkait dan para pemangku kepentingan lainnya terkait kesiapan penyediaan bahan baku dan produksi bahan bakar penerbangan berkelanjutan

Triwulan III: Koordinasi intensif dengan K/L terkait dan para pemangku kepentingan lainnya terkait strategi penanganan isu bahan bakar penerbangan berkelanjutan Indonesia

Triwulan IV: Finalisasi penyusunan SK Tim Nasional Percepatan Pengembangan Industri Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan Indonesia dan Monitoring evaluasi penyelesaian isu bahan bakar penerbangan berkelanjutan Indonesia

6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan SDM Bidang Transportasi

Deskripsi Kegiatan

Pengembangan transportasi antar moda sangat penting untuk mengoptimalkan efisiensi dan kenyamanan perjalanan masyarakat. Dengan integrasi yang baik antara berbagai moda transportasi—seperti bus, kereta api, angkutan online, dan lain-lain—aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas umum meningkat, kemacetan lalu lintas dapat dikurangi, serta penggunaan sumber daya transportasi menjadi lebih optimal. Hal ini juga mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang menyebabkan polusi dan kemacetan.

Target 2025

Triwulan I : koordinasi intensif antara perguruan tinggi, kementerian/lembaga terkait, dan Kementerian Pendidikan Tinggi

Triwulan II : pemantauan proses pengajuan Statuta yang sudah disusun.

Triwulan III : finalisasi revisi Statuta berdasarkan hasil komunikasi dan persetujuan parsial yang diperoleh.

Triwulan IV : pengesahan Statuta oleh Kementerian Pendidikan Tinggi

7. Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi

Deskripsi Kegiatan

Kontribusi sektor penerbangan belum pulih ke pre-Covid 19, di mana kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor tersebut baru mencapai 17,24% dari realisasi 2019. Terdapat empat hal utama yang perlu dilakukan dalam optimasi kinerja kebandarudaraan, yaitu (i) beautifikasi tata kelola, (ii) digitalisasi, (iii) optimasi infrastruktur bandara, dan (iv) multimoda transportasi. Optimasi bandara akan meningkatkan kapasitas 2 bandara tersibuk di Indonesia, yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Soekarno Hatta masing-masing menjadi 32 juta dan 94 juta penumpang tanpa pembangunan fasilitas baru. Upaya ini dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian sebesar Rp900 triliun (hasil kajian Boston Consulting Group).

Integrasi deklarasi sistem penumpang penerbangan internasional sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan akurasi dalam proses pemeriksaan imigrasi serta kepabeanan di bandara. Dengan sistem terintegrasi, data penumpang dapat diproses secara real-time oleh berbagai instansi terkait (imigrasi, bea cukai, karantina) sehingga mempercepat alur penumpang, mengurangi potensi antrian, serta meminimalisir risiko human error dan potensi penyalahgunaan data.

Selain itu, penerapan sistem ini meningkatkan daya saing bandara di tingkat internasional.

Target 2025
 Triwulan I : pembentukan tim integrasi antar-instansi
 Triwulan II : pengembangan awal sistem dan penyelesaian perjanjian kerja sama
 Triwulan III : uji coba di bandara internasional dan finalisasi SOP
 Triwulan IV : implementasi penuh sistem integrasi deklarasi di seluruh bandara internasional

Tujuan:
 Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pada pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia

- Satuan Pengukuran** :
- Unit Penanggung jawab** :
- Penyedia Data** :
- Sumber Data** :
- Jenis Konsolidasi Periode** :
- Jenis Konsolidasi Lokasi** :
- Polarisasi** :
- Periode Pelaporan** :
- Tabel Data** :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	N/A	N/A	20%
TRIWULAN 2	N/A	N/A	50%
TRIWULAN 3	N/A	N/A	80%
TRIWULAN 4	N/A	N/A	100%

**Manual Indikator Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas**

Sasaran Program (SP)	:	SP.2 Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Yang Efektif dan Efisien di Bidang Konektivitas																									
Deskripsi SP	:	Sasaran ini menunjukkan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang konektivitas di Kementerian/Lembaga terkait. Keberhasilan pelaksanaan tugas ini akan mendukung peningkatan konektivitas transportasi nasional.																									
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 2.2 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Konektivitas																									
Kualitas IK	:	<input type="checkbox"/> <i>Ultimate Outcome</i> <input type="checkbox"/> <i>Intermediate Outcome</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Immediate Outcome</i> <input type="checkbox"/> Output																									
Deskripsi IK	:	<p>Definisi: Hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas dengan melakukan survei kepuasan pelayanan ke kementerian/lembaga/ <i>stakeholders</i> terkait yang berada di bawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas.</p> <p>Survei dilakukan menggunakan google form dengan skala likert 1-4 dan disampaikan dalam kegiatan koordinasi yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas.</p> <p>Formula: Formula perhitungan mengacu pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (X)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,542</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tujuan: Untuk mengukur tingkat efektivitas proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas.</p>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,542	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)																							
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																							
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																							
3	3,0644 – 3,542	76,61 – 88,30	B	Baik																							
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																							
Satuan Pengukuran	:	Persentase																									
Unit Penanggung jawab	:	Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas																									
Penyedia Data	:	1. Unit Kerja Eselon II Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas 2. Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Infra dan yang terkait																									
Sumber Data	:	Hasil survei kepuasan pelayanan dari <i>stakeholders</i>																									
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input checked="" type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Take last known value																									
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input checked="" type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data																									
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize																									
Periode Pelaporan	:	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan																									

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	N/A	N/A	-
TRIWULAN 2	N/A	N/A	-
TRIWULAN 3	N/A	N/A	-
TRIWULAN 4	N/A	N/A	3,1

**Manual Indikator Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas**

Sasaran Program (SP)	:	SP.3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas yang Efektif dan Efisien
Deskripsi SP	:	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas adalah kondisi dimana implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan secara efektif melalui serangkaian aktivitas seperti komitmen pimpinan, penyusunan rencana aksi, penyusunan tim kerja, monitoring dan evaluasi hingga penilaian mandiri.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 3.1 Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas
Kualitas IK	:	<input type="checkbox"/> Ultimate Outcome <input checked="" type="checkbox"/> Intermediate Outcome <input type="checkbox"/> Immediate Outcome <input type="checkbox"/> Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi:</p> <p>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksana Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas adalah nilai atas capaian pembangunan Zona Integritas di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE).</p> <p>Tercapaiannya ZI menunjukkan bahwa unit kerja telah berhasil membangun dan menerapkan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi dan berkinerja tinggi serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.</p> <p>Formula:</p> <p>Hasil penilaian Inspektorat terhadap zona integritas Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas.</p> <p>Penilaian Inspektorat terhadap implementasi Zona Integritas berdasarkan enam Komponen Pengungkit yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perubahan, 2. Penataan Tatalaksana, 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 4. Penguatan Akuntabilitas 5. Penguatan Pengawasan, dan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik <p>Serta dua Komponen Hasil yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel 2. Pelayanan Publik yang Prima <p>Adapun pihak yang terkait erat dalam pencapaian Indikator Kinerja (<i>crosscutting</i>) ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Internal: Sekretariat Kemenko Marves 2. Eksternal: Kementerian PANRB, BPKP <p>Tujuan:</p> <p>Menilai perkembangan pembangunan zona integritas di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.</p>
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Unit Penanggung jawab	:	Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas
Penyedia Data	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat 2. Kementerian PANRB
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi PMPZI dari Inspektorat
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize

Periode Pelaporan : Triwulan Semesteran Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	N/A	N/A	-
TRIWULAN 2	N/A	N/A	-
TRIWULAN 3	N/A	N/A	-
TRIWULAN 4	75	83,67	85

**Manual Indikator Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas**

Sasaran Program (SP)	:	SP.3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas yang Efektif dan Efisien
Deskripsi SP	:	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas adalah kondisi dimana implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan secara efektif melalui serangkaian aktivitas seperti komitmen pimpinan, penyusunan rencana aksi, penyusunan tim kerja, monitoring dan evaluasi hingga penilaian mandiri.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 3.2 Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas
Kualitas IK	:	<input type="checkbox"/> <i>Ultimate Outcome</i> <input type="checkbox"/> <i>Intermediate Outcome</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Immediate Outcome</i> <input type="checkbox"/> Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi:</p> <p>Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas adalah nilai atas capaian pelaksanaan SAKIP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE).</p> <p>Nilai SAKIP menunjukkan Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas telah menerapkan efisiensi, efektivitas dan transparansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.</p> <p>Formula:</p> <p>Hasil evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal <p>Adapun pihak yang terkait dalam pencapaian Indikator Kinerja (<i>crosscutting</i>) ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Internal: Biro MKKS Sekretariat Kemenko Infra dan Inspektorat 2. Eksternal: Kementerian PAN RB <p>Tujuan:</p> <p>Menilai perkembangan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kemenko Infra dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.</p>
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Unit Penanggung jawab	:	Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas
Penyedia Data	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PANRB 2. Inspektorat
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	N/A	N/A	-
TRIWULAN 2	N/A	N/A	-
TRIWULAN 3	N/A	N/A	-
TRIWULAN 4	75	75,05	85

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AYODHIA G.L. KALAKE

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN NOMOR
123/S TAHUN 2025 TENTANG INDIKATOR
KINERJA LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

INDIKATOR KINERJA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DASAR

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA
Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur Dasar
Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur Dasar.
	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur Dasar
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar yang Efektif dan Efisien	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar
	Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

Manual Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

Sasaran Program (SP)	:	SP.1 Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan
Deskripsi SP	:	Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan adalah terciptanya peningkatan ketahanan air secara nasional guna mendukung meningkatkan ketersediaan Air yang merata dan berkelanjutan, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas air bersih, meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan air, memperkuat ketangghan terhadap risiko bencana terkait air, mendorong tata kelola air yang terintegrasi dan partisipasif, serta melindungi dan memulihkan ekosistem Sumber Daya Air.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 1.1 Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur Dasar
Kualitas IK	:	(x) <i>Ultimate Outcome</i> () <i>Intermediate Outcome</i> () <i>Immediate Outcome</i> () Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi:</p> <p>Definisi ketahanan air yakni “Keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air”</p> <p>Berdasarkan Kebijakan Nasional pengelolaan Sumber daya air (Jaknas) indikator Ketahanan Air Indonesia perlu disusun berdasarkan 5 pilar/segmen pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi Sumber Daya Air; 2. Pendayagunaan sumber daya air; 3. Pengendalian Daya Rusak air; 4. Peran serta masyarakat; 5. Sistem informasi sumber daya air. i <p>Adapun Deputi 3 mengawal 3 pilar segmen pengelolaan SDA yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi Sumber Daya Air; 2. Pendayagunaan sumber daya air; 3. Pengendalian Daya Rusak air. <p>Indikator ini mengukur tingkat pencapaian target pembangunan di sektor infrastruktur yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional, baik menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP).</p> <p>Target RPJMN adalah 3,50 pada tahun 2025 dan 3,75 pada tahun 2029. Adapun Indikator RPJMN ini mendukung pihak-pihak yang terkait (crosscutting) dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dewan Sumber Daya Air Nasional, dan Pemerintah Daerah.</p> <p>Progress Capaian triwulan dari Indikator Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur Dasar dapat dilihat pada rencana aksi IKSP 2.1 yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Nilai Indeks Pertanaman Nasional berdasarkan volume layanan irigasi (implementasi instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan).</p> <p>Formulasi:</p> <p style="text-align: center;">Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur Dasar</p> $\frac{\text{Capaian Indikator Pembangunan}}{\text{Target Indikator Pemabngunan}} \times 100\%$ <p>Tujuan:</p> <p>Memberikan gambaran objektif untuk menilai kebijakan Pemerintah yang mendukung infrastruktur dasar bagi masyarakat.</p>
Satuan Pengukuran	:	Persentase
Unit Penanggung jawab	:	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

Penyedia Data	:	1. Bappenas 2. Badan Pusat Statistik 3. Kementerian Pekerjaan Umum 4. Dewan Sumber Daya Nasional
Sumber Data	:	Laporan Dewan Sumber Daya Air Nasional
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
Tabel Data	:	

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	N/A	N/A	-
TRIWULAN 2	N/A	N/A	-
TRIWULAN 3	N/A	N/A	-
TRIWULAN 4	N/A	N/A	100%

Manual Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

Sasaran Program (SP)	:	SP.2 Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Dasar yang Berkualitas
Deskripsi SP	:	Terselesainya program prioritas dan isu strategis melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang efektif dan berkualitas guna mendukung pencapaian target di bidang Infrastruktur Dasar.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 2.1 Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur Dasar
Kualitas IK	:	() <i>Ultimate Outcome</i> () <i>Intermediate Outcome</i> (x) <i>Immediate Outcor.</i> () Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi:</p> <p>Indikator ini mengukur penyelesaian isu strategis yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar. Isu strategis merupakan bagian dari program strategis pemerintah dan penugasan dari Menko. Adapun isu strategis Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar pada 2025 sebagai berikut:</p> <p>1. Koordinasi dan Sinkronisasi Presentase luas kawasan prioritas yang dilindungi daya rusak air dalam rangka perlindungan pesisir dan penanganan banjir terpadu Pulau Jawa</p> <p>Fokus kegiatan mencakup Langkah mitigasi risiko perubahan iklim dan peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi, khususnya di kawasan pesisir Pulau Jawa. Kegiatan ini mencakup penguatan tanggul pantai, rehabilitasi mangrove, peningkatan sistem drainase, serta perencanaan dan pengembangan tahap awal konsep <i>Giant Sea Wall</i> sebagai proteksi jangka panjang terhadap kenaikan muka air laut. Kegiatan akan dilaksanakan melalui pendekatan lintas sektor, berbasis kawasan, dan berkelanjutan.</p> <p>Unit Kerja/Kementerian/Lembaga yang terlibat</p> <ul style="list-style-type: none">● Internal: Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.● Eksternal: Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah serta K/L terkait lainnya. <p>Adapun target presentase luas kawasan prioritas yang dilindungi daya rusak air dalam rangka perlindungan pesisir dan penanganan banjir terpadu Pulau Jawa untuk tahun 2025 sesuai RPJMN adalah 12 persen.</p> <p>2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan operasional sekolah rakyat</p> <p>Sektor pendidikan merupakan salah satu pilar utama yang tercantum dalam Asta Cita untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Program sekolah rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam rangka pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Sekolah rakyat akan dibuat menjadi sistem asrama dengan target anak-anak dari kelompok ekonomi rendah di Indonesia untuk memberikan akses belajar yang inklusif dan berkualitas, khususnya di daerah yang kurang terjangkau layanan pendidikan formal.</p> <p>Unit Kerja/Kementerian/Lembaga yang Terlibat</p> <ul style="list-style-type: none">● Internal : Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar● Eksternal. : Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Daerah, Badan Usaha.

Adapun target pembangunan sekolah yang dilengkapi fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung satuan Pendidikan sekolah rakyat sebanyak 100 sekolah.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Nilai Indeks Pertanaman Nasional berdasarkan volume layanan irigasi (implementasi instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)

Peningkatan Indeks Pertanaman nasional merupakan bagian amanat presiden yang tertuang di dalam asti cita yang bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan. Adapun pengukuran indeks dilakukan melalui rata-rata jumlah berapa kali padi dapat dipanen dalam setahun, saat ini Indeks Pertanaman Nasional berkisar antara 1,4-1,5 berdasarkan data dari BPS (2023). Untuk mencapai swasembada pangan kita harus meningkatkan Indeks Pertanaman sampai dengan angka 2.0-2,5, untuk mencapai hal tersebut diterbitkan Inpres No 2 Tahun 2025 tentang fasilitasi irigasi di daerah untuk optimalisasi lahan di daerah irigasi yang selama ini membutuhkan air.

Unit Kerja/Kementerian/Lembaga yang Terlibat

- Internal : Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar.
- Eksternal : Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Daerah.

Adapun target indeks pertanaman nasional pada tahun 2025 adalah 2.0.

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pembangkit Listrik berbasis Energi Terbarukan – Pemanfaatan Waduk untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) Apung (12 kota/kabupaten)

Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan transisi energi dengan memperluas pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Salah satu fokus strategis adalah pemanfaatan potensi waduk sebagai lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai target bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025. Pemanfaatan waduk dinilai strategis karena tidak memerlukan lahan tambahan, memiliki potensi teknis yang besar, serta mampu mengurangi penguapan air dan meningkatkan efisiensi panel surya akibat efek pendinginan dari permukaan air.

Basis data kegiatan ini merujuk pada laporan dan pemetaan potensi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal EBTKE, di mana pada 2024 tercatat terdapat lebih dari 27 lokasi waduk prioritas yang siap dikembangkan untuk PLTS terapung, termasuk Waduk Cirata di Jawa Barat sebagai proyek percontohan terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, berdasarkan data dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) menunjukkan bahwa proyek PLTS terapung yang sedang dibangun atau dalam tahap perencanaan dapat menyumbang lebih dari 1.200 MW terhadap kapasitas terpasang EBT nasional. Sementara dalam RPJMN 2024-2029 sendiri target produksi listrik energi terbarukan di tahun 2025 ini sebesar 50.739 GWH. Kegiatan ini juga didukung oleh kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan investor swasta melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan mekanisme pembiayaan hijau.

Adapun target capaian pada tahun 2025 adalah teridentifikasinya 5 waduk yang siap untuk dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Apung.

Unit Kerja/Kementerian/Lembaga yang Terlibat

- Internal : Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	N/A	N/A	25%
TRIWULAN 2	N/A	N/A	50%
TRIWULAN 3	N/A	N/A	75%
TRIWULAN 4	N/A	N/A	100%

**Manual Indikator Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar**

Sasaran Program (SP)	:	SP.2 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Dasar yang Berkualitas																									
Deskripsi SP	:	Terselesainya program prioritas dan isu strategis melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang efektif dan berkualitas guna mendukung pencapaian target di bidang Infrastruktur Dasar.																									
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 2.2 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur Dasar																									
Kualitas IK	:	() <i>Ultimate Outcome</i> () <i>Intermediate Outcome</i> (x) <i>Immediate Outcome</i> () Output																									
Deskripsi IK	:	<p>Definisi:</p> <p>Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur Dasar mengukur efektivitas koordinasi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Infrastruktur Dasar dengan menilai tingkat kepuasan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.</p> <p>Semakin tinggi kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pelaksanaan layanan koordinasi, audiensi, narasumber, konsultasi, penanganan pengaduan pelayanan publik, penyediaan data dan informasi publik semakin baik kualitas layanan yang diberikan. Indeks ini menjadi alat evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan sinergi dan pencapaian target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.</p> <p>Survei dilakukan menggunakan google form dengan skala nilai 1 - 4 dan disampaikan dalam kegiatan rapat koordinasi, audiensi, narasumber, konsultasi, penanganan pengaduan pelayanan publik, penyediaan data dan informasi publik yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar.</p> <p>Target Indkes Kepuasan Layanan tahun 2025 adalah 3.1</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Stakeholder yang Puas dengan Layanan Korodinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian}}{\text{Stakeholder yang Mendapatkan Layanan Korodinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian}} \times 100\%$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (X)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,542</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tujuan:</p> <p>Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terkait rekomendasi kebijakan di Bidang Infrastruktur Dasar.</p>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,542	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)																							
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																							
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																							
3	3,0644 – 3,542	76,61 – 88,30	B	Baik																							
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																							
Satuan Pengukuran	:	Persentase																									
Unit Penanggung jawab	:	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar																									
Penyedia Data	:	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Kementerian Koordinator, Sekretariat Deputi, Para Asisten Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar • K/L dan Pemda yang berkoordinasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar 																									
Sumber Data	:	Survei Kepuasan <i>Stakeholder</i>																									
Jenis Konsolidasi Periode	:	() Sum (x) Average () Take last known value																									
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	() Sum (x) Average () Raw Data																									
Polarisasi	:	(x) Maximize () Minimize () Stabilize																									

Periode Pelaporan : Triwulan Semesteran Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	N/A	N/A	3.1
TRIWULAN 2	N/A	N/A	3.1
TRIWULAN 3	N/A	N/A	3.1
TRIWULAN 4	N/A	N/A	3.1

**Manual Indikator Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi**

Sasaran Program (SP)	:	SS.3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar
Deskripsi SP	:	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar adalah kondisi dimana implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan secara efektif melalui serangkaian aktivitas seperti komitmen pimpinan, penyusunan rencana aksi, penyusunan tim kerja, monitoring dan evaluasi hingga penilaian mandiri.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP.3.1 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar
Kualitas IK	:	() <i>Ultimate Outcome</i> (x) <i>Intermediate Outcome</i> () <i>Immediate Outcome</i> () Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi:</p> <p>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar adalah nilai atas capaian pembangunan Zona Integritas di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE).</p> <p>Tercapaiannya ZI menunjukkan bahwa unit kerja telah berhasil membangun dan menerapkan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi dan berkinerja tinggi serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.</p> <p>Formula:</p> <p>Hasil penilaian Inspektorat terhadap zona integritas Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar.</p> <p>Penilaian Inspektorat terhadap implementasi Zona Integritas berdasarkan enam Komponen Pengungkit yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perubahan, 2. Penataan Tatalaksana, 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 4. Penguatan Akuntabilitas 5. Penguatan Pengawasan, dan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik <p>Serta dua Komponen Hasil yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel 2. Pelayanan Publik yang Prima <p>Adapun pihak yang terkait erat dalam pencapaian Indikator Kinerja (<i>crosscutting</i>) ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Internal: Sekretariat Kemenko Marves 2. Eksternal: Kementerian PANRB, BPKP <p>Tujuan:</p> <p>Menilai perkembangan pembangunan zona integritas di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan</p>
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Unit Penanggung jawab	:	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar
Penyedia Data	:	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PAN RB • Inspektorat
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi PMPZI dari Inspektorat
Jenis Konsolidasi Periode	:	() Sum () Average (x) Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	() Sum () Average (x) Raw Data

Polarisasi : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Triwulan Semesteran Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	-	-	-
TRIWULAN 2	-	-	-
TRIWULAN 3	-	-	-
TRIWULAN 4	76	79,77	85

Manual Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

Sasaran Program (SP)	:	SP.3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar yang Efektif dan Efisien
Deskripsi SP	:	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar adalah kondisi di mana implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan secara efektif melalui serangkaian aktivitas seperti komitmen pimpinan, penyusunan rencana aksi, penyusunan tim kerja, monitoring dan evaluasi hingga penilaian mandiri.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 3.2 Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar
Kualitas IK	:	<input type="checkbox"/> Ultimate Outcome <input type="checkbox"/> Intermediate Outcome <input checked="" type="checkbox"/> Immediate Outcome <input type="checkbox"/> Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi:</p> <p>Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar adalah nilai atas capaian pelaksanaan SAKIP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE).</p> <p>Nilai SAKIP menunjukkan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar telah menerapkan efisiensi, efektivitas dan transparansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan</p> <p>Formula:</p> <p>Hasil evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan Kinerja2. Pengukuran Kinerja3. Pelaporan Kinerja4. Evaluasi Internal <p>Adapun pihak yang terkait dalam pencapaian Indikator Kinerja (<i>crosscutting</i>) ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Internal: Biro MKKS Sekretariat Kemenko Infra dan Inspektorat2. Eksternal: Kementerian PAN RB <p>Tujuan:</p> <p>Menilai perkembangan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kemenko Infra dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.</p>
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Unit Penanggung jawab	:	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar
Penyedia Data	:	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian PAN RB• Inspektorat
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	-	-	-
TRIWULAN 2	-	-	-
TRIWULAN 3	-	-	-
TRIWULAN 4	75	74,65	85

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AYODHIA G.L. KALAKE

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN NOMOR
123/S TAHUN 2025 TENTANG INDIKATOR
KINERJA LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA
Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Merata dan Berkelanjutan	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Efektif dan Efisien	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman

**Manual Indikator Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi
Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman**

Sasaran Program (SP)	:	SP.1 Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Merata dan Berkelanjutan																																						
Deskripsi SP	:	Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Merata dan Berkelanjutan adalah terciptanya akses yang lebih mudah, keterjangkauan yang lebih baik, merata serta keberlanjutan dalam penyediaan hunian dan infrastruktur permukiman guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.																																						
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 1.1 Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman																																						
Kualitas IK	:	(x) <i>Ultimate Outcome</i> () <i>Intermediate Outcome</i> () <i>Immediate Outcome</i> () Output																																						
Deskripsi IK	:	<p>Definisi: Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman merupakan indikator yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029.</p> <p>Capaian tersebut merupakan persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan rincian sebagai berikut: Aspek Hunian Layak => Rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (<i>sufficient living space</i>) 2. memiliki akses terhadap air minum layak 3. memiliki akses terhadap sanitasi layak 4. ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah. <p>Aspek Keterjangkauan => Diukur berdasarkan pengeluaran untuk rumah tidak melebihi 25 s/d 30% dari pendapatan rumah tangga per bulan, namun saat ini Susenas hanya menyediakan data pengeluaran rumah tangga.</p> <p>Aspek Berkelanjutan => Belum terdapat definisi terkait aspek berkelanjutan.</p> <p>Target RPJMN adalah 67% pada 2025, dan 74% pada 2029. Badan Pusat Statistik telah menghitung Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dengan data capaian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>56,51</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>59,54</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>60,90</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>60,66</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>63,15</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>65,25</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan data capaian dari tahun 2019 - 2024, jika dihitung pertumbuhan secara linear maka diperoleh proyeksi capaian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Target RPJMN</th> <th>Kalkulasi Linear</th> <th>Target vs Linear</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025</td> <td>67,00</td> <td>66,43</td> <td>99,15%</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td></td> <td>67,98</td> <td>99,97%</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td></td> <td>69,53</td> <td>99,33%</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td></td> <td>71,08</td> <td>98,73%</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>74,00</td> <td>72,64</td> <td>98,16%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Target tahunan Perjanjian Kinerja menggunakan target Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak sesuai dengan target RPJMN.</p>	Tahun	Capaian	2019	56,51	2020	59,54	2021	60,90	2022	60,66	2023	63,15	2024	65,25	Tahun	Target RPJMN	Kalkulasi Linear	Target vs Linear	2025	67,00	66,43	99,15%	2026		67,98	99,97%	2027		69,53	99,33%	2028		71,08	98,73%	2029	74,00	72,64	98,16%
Tahun	Capaian																																							
2019	56,51																																							
2020	59,54																																							
2021	60,90																																							
2022	60,66																																							
2023	63,15																																							
2024	65,25																																							
Tahun	Target RPJMN	Kalkulasi Linear	Target vs Linear																																					
2025	67,00	66,43	99,15%																																					
2026		67,98	99,97%																																					
2027		69,53	99,33%																																					
2028		71,08	98,73%																																					
2029	74,00	72,64	98,16%																																					

Progress capaian triwulan dari indikator Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman dapat dilihat pada rencana aksi IKSP 2.1 Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas.
Formula:
Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman =
$\frac{\text{Capaian Indikator Pembangunan}}{\text{Target Indikator Pembangunan}} \times 100\%$
Capaian triwulan dapat diperoleh dengan perhitungan berikut =
$\frac{\text{Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi}}{\text{Jumlah Rencana Aksi}} \times 100\%$
Tujuan:
Memberikan gambaran objektif untuk menilai kebijakan Pemerintah yang mendukung penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat.

Satuan Pengukuran	:	Persentase
Unit Penanggung jawab	:	Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
Penyedia Data	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pusat Statistik 2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Kementerian Pekerjaan Umum
Sumber Data	:	<p>Rilis BPS terkait Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Menurut Provinsi (Persen), 2024</p> <p>https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MT10MSMy/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau-menurut-provinsi--persen-.html</p>
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input checked="" type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
Tabel Data	:	

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	N/A	N/A	-
TRIWULAN 2	N/A	N/A	-
TRIWULAN 3	N/A	N/A	-
TRIWULAN 4	N/A	N/A	100%

**Manual Indikator Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi
Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman**

Sasaran Program (SP)	:	SP.2 Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas
Deskripsi SP	:	Terselesainya program prioritas dan isu strategis melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang efektif dan berkualitas guna mendukung pencapaian target di bidang pembangunan perumahan serta sarana dan prasarana permukiman.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 2.1 Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
Kualitas IK	:	() <i>Ultimate Outcome</i> () <i>Intermediate Outcome</i> (x) <i>Immediate Outcome</i> () Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi:</p> <p>Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang akan diselesaikan yaitu:</p> <p>1. Penyediaan Hunian Tapak, dan Vertikal yang terintegrasi melalui <i>Transit-Oriented Development (TOD)/Transit-Oriented Affordable Housing (TOAH)</i></p> <p>Program ini bertujuan untuk menghadirkan hunian yang strategis, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Program ini mengintegrasikan pembangunan perumahan dengan sistem transportasi massal guna meningkatkan aksesibilitas, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta mendorong efisiensi mobilitas perkotaan.</p> <p>Melalui pendekatan Transit-Oriented Development (TOD), hunian vertikal dan tapak dikembangkan di sekitar simpul-simpul transportasi seperti stasiun kereta, terminal bus, dan halte transportasi publik lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah mengakses sarana transportasi yang lebih efisien, mengurangi waktu tempuh, serta mengurangi emisi karbon akibat penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan.</p> <p>Selain itu, konsep Transit-Oriented Affordable Housing (TOAH) memastikan bahwa hunian yang dibangun tidak hanya terintegrasi dengan transportasi, tetapi juga tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini dilakukan melalui skema pembiayaan yang inklusif, insentif bagi pengembang, serta pemanfaatan lahan milik negara atau daerah yang strategis.</p> <p>Unit Kerja/Kementerian/Lembaga yang Terlibat</p> <ul style="list-style-type: none">• Internal: Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Deputi Infrastruktur Dasar• Eksternal: Pemerintah Daerah, Kementerian BUMN, Badan Usaha Perkeretapihan, Kementerian Perhubungan, Kementerian PKP, Kementerian Pekerjaan Umum, Lembaga Pembiayaan <p>Target Tahun 2025 adalah Terbangunnya 1 (satu) TOD/TOAH di Pulau Jawa yang terintegrasi dengan permukiman yang terjangkau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)</p> <p>2. Peningkatan Kualitas Hunian di Daerah Tertinggal</p> <p>Peningkatan kualitas hunian di daerah tertinggal, khususnya di kawasan Indonesia Timur, merupakan salah satu prioritas dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, sulitnya memperoleh material konstruksi yang memadai, serta minimnya konektivitas dengan pusat-pusat ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase rumah tangga dengan rumah layak huni di wilayah Indonesia Timur masih lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.</p>

<p>Unit Kerja/Kementerian/Lembaga yang Terlibat</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Internal: Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Deputi Infrastruktur Dasar ● Eksternal: Pemerintah Daerah, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Desa PDT, Kementerian Pekerjaan Umum <p>Target Tahun 2025 adalah Meningkatnya jumlah hunian yang layak pada daerah tertinggal di Indonesia Timur sebesar 2%.</p>
<p>Formula:</p> <p>Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman =</p> $\frac{\text{Isu - isu Strategis yang Diselesaikan oleh Deputi}}{\text{Isu - isu Strategis yang Ditugaskan untuk Diselesaikan}} \times 100\%$
<p>Tujuan:</p> <p>Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terkait rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman.</p>

Satuan Pengukuran :

Persentase

Unit Penanggung jawab :

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
--

Penyedia Data :

<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Kementerian Pekerjaan Umum 3. Kementerian Perhubungan <p>Penyediaan Hunian Tapak, dan Vertikal yang terintegrasi melalui <i>Transit-Oriented Development (TOD)/Transit-Oriented Affordable Housing (TOAH)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan Kemudahan mekanisme untuk mendapatkan perumahan di kawasan TOD Target: MoU/Sistem 2. Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan Penyediaan lahan kawasan TOD Target: Tersedianya lahan TOD 3. Asisten Deputi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman Penataan kawasan TOD Target: Tersedianya <i>Grand Design</i> TOD 4. Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pembiayaan Pembangunan dan Kepemilikan Perumahan Target: Tersedianya Pola Pembiayaan di TOD <p>Peningkatan Kualitas Hunian di Daerah Tertinggal</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Asisten Deputi Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal Koordinasi peningkatan kualitas hunian di daerah tertinggal di Indonesia Timur

Sumber Data :

Laporan Penyelesaian Isu Strategis dari Asisten Deputi
--

Jenis Konsolidasi Periode :

<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
------------------------------	----------------------------------	---

Jenis Konsolidasi Lokasi :

<input type="checkbox"/> Sum	<input checked="" type="checkbox"/> Average	<input type="checkbox"/> Raw Data
------------------------------	---	-----------------------------------

Polarisasi :

<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
--	-----------------------------------	------------------------------------

Periode Pelaporan :

<input type="checkbox"/> Triwulan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
-----------------------------------	-------------------------------------	---

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	N/A	N/A	25%
TRIWULAN 2	N/A	N/A	50%
TRIWULAN 3	N/A	N/A	75%
TRIWULAN 4	N/A	N/A	100%

**Manual Indikator Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi
Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman**

Sasaran Program (SP)	:	SP.2 Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas																									
Deskripsi SP	:	Terselesainya program prioritas dan isu strategis melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang efektif dan berkualitas guna mendukung pencapaian target di bidang pembangunan perumahan serta sarana dan prasarana permukiman.																									
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 2.2 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman																									
Kualitas IK	:	() <i>Ultimate Outcome</i> () <i>Intermediate Outcome</i> (x) <i>Immediate Outcome</i> () Output																									
Deskripsi IK	:	<p>Definisi:</p> <p>Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pembangunan Perumahan serta Sarana dan Prasarana Permukiman mengukur efektivitas koordinasi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pembangunan Perumahan serta Sarana dan Prasarana Permukiman dengan menilai tingkat kepuasan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.</p> <p>Semakin tinggi kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pelaksanaan koordinasi, semakin baik kualitas layanan yang diberikan. Indeks ini menjadi alat evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan sinergi dan pencapaian target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.</p> <p>Target tahun 2025 adalah PUAS (3,1) diperoleh dari hasil survey yang dilakukan</p> <p>Formula:</p> <p>Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman =</p> $\frac{\text{Stakeholder yang Puas dengan Layanan Korodinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian}}{\text{Stakeholder yang Mendapatkan Layanan Korodinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian}} \times 100\%$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (X)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,542</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tujuan:</p> <p>Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terkait rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman.</p>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,542	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)																							
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																							
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																							
3	3,0644 – 3,542	76,61 – 88,30	B	Baik																							
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																							
Satuan Pengukuran	:	Persentase																									
Unit Penanggung jawab	:	Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman																									
Penyedia Data	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Deputi 2. Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan 3. Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan 4. Asisten Deputi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman 5. Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman 6. Asisten Deputi Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal 																									
Sumber Data	:	Survei Kepuasan <i>Stakeholder</i>																									
Jenis Konsolidasi Periode	:	() Sum (x) Average () Take last known value																									

Jenis Konsolidasi Lokasi : Sum Average Raw Data

Polarisasi : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Triwulan Semesteran Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	N/A	N/A	3,1
TRIWULAN 2	N/A	N/A	3,1
TRIWULAN 3	N/A	N/A	3,1
TRIWULAN 4	N/A	N/A	3,1

**Manual Indikator Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi
Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman**

Sasaran Program (SP)	:	SS.3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Efektif dan Efisien
Deskripsi SP	:	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman adalah kondisi dimana implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan secara efektif melalui serangkaian aktivitas seperti komitmen pimpinan, penyusunan rencana aksi, penyusunan tim kerja, monitoring dan evaluasi hingga penilaian mandiri.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP.3.1 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
Kualitas IK	:	<input type="checkbox"/> <i>Ultimate Outcome</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Intermediate Outcome</i> <input type="checkbox"/> <i>Immediate Outcome</i> <input type="checkbox"/> Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi: Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat.</p> <p>Indikator kinerja ini menggantikan Indikator Kinerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang saat ini tidak dilakukan penilaian karena perubahan mekanisme ke Reformasi Birokrasi Tematik</p> <p>Formula: Penilaian Inspektorat terhadap implementasi Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang berdasarkan 6 Komponen Pengungkit yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perubahan, 2. Penataan Tatalaksana, 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 4. Penguatan Akuntabilitas 5. Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik <p>Serta 2 Komponen Hasil yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel 2. Pelayanan Publik yang Prima <p>Tujuan: Untuk mengukur capaian Nilai PMPZI lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman</p>
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Unit Penanggung jawab	:	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
Penyedia Data	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PANRB 2. Inspektorat
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman dari Inspektorat
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	N/A	N/A	-
TRIWULAN 2	N/A	N/A	-
TRIWULAN 3	N/A	N/A	-
TRIWULAN 4	79	84.04	85

**Manual Indikator Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi
Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman**

Sasaran Program (SP)	:	SS.3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Efektif dan Efisien
Deskripsi SP	:	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman adalah kondisi di mana implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan secara efektif melalui serangkaian aktivitas seperti komitmen pimpinan, penyusunan rencana aksi, penyusunan tim kerja, monitoring dan evaluasi hingga penilaian mandiri.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSP 3.2 Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
Kualitas IK	:	<input type="checkbox"/> Ultimate Outcome <input type="checkbox"/> Intermediate Outcome <input checked="" type="checkbox"/> Immediate Outcome <input type="checkbox"/> Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi: Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat.</p> <p>Formula: Penilaian Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang meliputi: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal</p> <p>Tujuan: Untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman</p>
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Unit Penanggung jawab	:	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
Penyedia Data	:	1. Kementerian PANRB 2. Inspektorat
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman dari Inspektorat
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	N/A	N/A	-
TRIWULAN 2	N/A	N/A	-
TRIWULAN 3	N/A	N/A	-
TRIWULAN 4	80	82,40	85

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AYODHIA G.L. KALAKE

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
NOMOR 123/S TAHUN 2025 TENTANG INDIKATOR
KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Opini BPK
Terwujudnya Hasil Pengawasan Internal yang Optimal	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
	Nilai Evaluasi atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
	Rata-rata Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Eselon I
	Jumlah Unit Kerja Eselon I yang Memenuhi Syarat Untuk Diusulkan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
Meningkatnya Peran APIP dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Indeks Kapabilitas APIP Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025

Manual Indikator Kinerja Inspektorat

Sasaran Kegiatan (SK)	:	SK.1 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
Deskripsi SK	:	<p>Keberadaan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang kuat juga ditopang oleh pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel. Dalam hal ini pengelolaan anggaran meliputi penyusunan rencana kerja, penuangan rencana anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan Laporan Keuangan.</p> <p>Optimal berarti paling baik dan tertinggi.</p> <p>Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Ruang lingkup: Anggaran yang Optimal dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuhinya target-target kinerja yang telah ditetapkan.</p>
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSK 1.1 Opini BPK
Kualitas IK	:	() <i>Ultimate Outcome</i> (x) <i>Intermediate Outcome</i> () <i>Immediate Outcome</i> () Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi:</p> <p>Opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan (<i>full disclosure</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).</p> <p>Opini BPK terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) - skala 5,Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas - skala 4,Wajar Dengan Pengecualian (WDP) - skala 3,Tidak Wajar (<i>Adverse</i>) - skala 2,Tidak Memberikan Pendapat (<i>Disclaimer</i>) - skala 1. <p>Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (disingkat LKPP) adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.</p> <p>Batasan waktu: 1 tahun anggaran</p> <p>Data akan diperoleh pada Triwulan II pada tahun berikutnya.</p> <p>Indeks opini BPK = Kesesuaian SAP + Kecukupan Pengungkapan + Kepatuhan Peraturan + Efektivitas SPI</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Presiden 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengalami pemisahan fungsi ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang menyebabkan adanya penyesuaian pelaksanaan anggaran.</p> <p>Pada Tahun 2025, BPK melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi TA 2024 sehingga capaian IKU tahun 2025 dapat dilihat dari hasil opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Marves TA 2024</p> <p>Formula:</p> <p>Predikat Opini BPK</p>

Tujuan:	
Untuk mengukur seberapa jauh tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan K/L	
Satuan Pengukuran	: Predikat
Unit Penanggung jawab	: Inspektorat
Penyedia Data	: Badan Pemeriksa Keuangan
Sumber Data	: LHP BPK atas LK Kemenko Marves TA 2024 yang terbit pada Triwulan II Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh BPK
Jenis Konsolidasi Periode	: <input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	: <input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
Konversi 120	: <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Tabel Data	:

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	-	-	-
TRIWULAN 2	-	-	-
TRIWULAN 3	WTP	WTP	WTP
TRIWULAN 4	-	-	-

Manual Indikator Kinerja Inspektorat

Sasaran Kegiatan (SK)	:	SK.2 Terwujudnya hasil pengawasan internal yang optimal
Deskripsi SK	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencapai tujuannya secara efektif dan efisien; 2. Melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal; 3. mengamankan aset negara; 4. Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSK 2.1 (Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK)
Kualitas IK	:	() <i>Ultimate Outcome</i> (x) <i>Intermediate Outcome</i> () <i>Immediate Outcome</i> () Output
Deskripsi IK	:	<div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px;">Definisi:</div> <p>Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan BPK yang ditindaklanjuti secara tuntas oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Presiden 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi mengalami pemisahan fungsi ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang menyebabkan adanya penyesuaian pelaksanaan anggaran.</p> <p>Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2024 atas Laporan Keuangan TA 2015 sd TA 2023 pada Kemenko Marves menunjukkan bahwa persentase penyelesaian tindak lanjut sebesar 100% yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebanyak 99,45% telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi; dan 2. Sebanyak 0,55% tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.
		Formulasi: Triwulan I $\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi atas LK Kemenko Marves 2015 – 2023}}{\text{Jumlah Rekomendasi atas LK Kemenko Marves 2015 – 2023}} \times 100\%$ <p>*) pada setiap tahun yang tercantum dalam Lampiran LHPTL BPK Semester II 2024</p>
		Triwulan III $\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi atas LK Kemenko Marves 2015 – 2024}}{\text{Jumlah Rekomendasi atas LK Kemenko Marves 2015 – 2024}} \times 100\%$ <p>*) pada setiap tahun yang tercantum dalam Lampiran LHPTL BPK Semester I 2025.</p>
		Tujuan: Tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara
Satuan Pengukuran	:	Persentase
Unit Penanggung jawab	:	Inspektorat
Penyedia Data	:	Badan Pemeriksa Keuangan Biro Perencanaan
Sumber Data	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Kemenko Marves TA 2024 yang dikeluarkan oleh BPK 2. Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK Semester II Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh BPK 3. Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK Semester I Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh BPK

- Jenis Konsolidasi Periode** : Sum Average Take last known value
- Jenis Konsolidasi Lokasi** : Sum Average Raw Data
- Polarisasi** : Maximize Minimize Stabilize
- Periode Pelaporan** : Triwulan Semesteran Tahunan
- Konversi 120** : Ya Tidak
- Tabel Data** :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	95%	-	80%
TRIWULAN 2	-	91,28%	-
TRIWULAN 3	95%	-	80%
TRIWULAN 4	-	95,63%	-

Manual Indikator Kinerja Inspektorat

Sasaran Kegiatan (SK)	:	SK.2 Terwujudnya hasil pengawasan internal yang optimal
Deskripsi SK	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencapai tujuannya secara efektif dan efisien; 2. Melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal; 3. mengamankan aset negara; 4. Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSK 2.2 Nilai Evaluasi atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
Kualitas IK	:	() <i>Ultimate Outcome</i> (x) <i>Intermediate Outcome</i> () <i>Immediate Outcome</i> () Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi:</p> <p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</p> <p>Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.</p> <p>Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.</p> <p>Fokus Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur-unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SPIP; b. MRI; c. IEPK; dan d. Kapabilitas APIP. <p>Interval skor tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP:</p> <p>Level 1, Rintisan (1,00 ≤ Skor < 2,00)</p> <p>Level 2, Berkembang (2,00 ≤ Skor < 3,00)</p> <p>Level 3, Terdefinisi (3,00 ≤ Skor < 4,00)</p> <p>Level 4, Terkelola dan Terukur (4,00 ≤ Skor < 4,50)</p> <p>Level 5, Optimum (≥ 4,50)</p> <p>Formula:</p> <p>Level SPIP Terintegrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 oleh BPKP.</p> <p>Tujuan:</p> <p>Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</p>
Satuan Pengukuran	:	Level

- Unit Penanggung jawab** :
- Penyedia Data** :
- Sumber Data** :
- Jenis Konsolidasi Periode** : Sum Average Take last known value
- Jenis Konsolidasi Lokasi** : Sum Average Raw Data
- Polarisasi** : Maximize Minimize Stabilize
- Periode Pelaporan** : Triwulan Semesteran Tahunan
- Tabel Data** :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	-	-	-
TRIWULAN 2	-	-	-
TRIWULAN 3	-	-	-
TRIWULAN 4	3,5	3,504	Level 3

Manual Indikator Kinerja Inspektorat

Sasaran Kegiatan (SK)	:	SK.2 Terwujudnya hasil pengawasan internal yang optimal
Deskripsi SK	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencapai tujuannya secara efektif dan efisien; 2. Melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal; 3. mengamankan aset negara; 4. Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSK 2.3 Rata-rata Nilai Evaluasi AKIP Eselon I
Kualitas IK	:	<input type="checkbox"/> <i>Ultimate Outcome</i> <input type="checkbox"/> <i>Intermediate Outcome</i> <input type="checkbox"/> <i>Immediate Outcome</i> <input checked="" type="checkbox"/> Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi: Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah Nilai AK pada LHE AKIP Eselon I Kemenko Infra Tahun 2025}}{\text{Jumlah Seluruh Unit Kerja Eselon I}}$ <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 2. menilai tingkat implementasi SAKIP; 3. menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 4. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan 5. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Unit Penanggung jawab	:	Inspektorat
Penyedia Data	:	Inspektorat
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Eselon I Kemenko Infra Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Inspektorat
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input checked="" type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
Tabel Data	:	

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	-	-	-
TRIWULAN 2	85	-	-
TRIWULAN 3	-	78,08	85
TRIWULAN 4	-	-	-

Manual Indikator Kinerja Inspektorat

Sasaran Kegiatan (SK)	:	SK.2 Terwujudnya hasil pengawasan internal yang optimal
Deskripsi SK	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencapai tujuannya secara efektif dan efisien; 2. Melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal; 3. mengamankan aset negara; 4. Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSK 2.4 Jumlah Unit Kerja Eselon I yang Memenuhi Syarat Untuk Diusulkan ZI Menuju WBK
Kualitas IK	:	<input type="checkbox"/> Ultimate Outcome <input type="checkbox"/> Intermediate Outcome <input type="checkbox"/> Immediate Outcome <input checked="" type="checkbox"/> Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi: Zona Integritas (ZI) adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.</p> <p>Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.</p> <p>Formula: Jumlah Unit Kerja Eselon I yang memenuhi syarat untuk diusulkan ZI menuju WBK ke Kementerian PANRB.</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memperoleh informasi mengenai pembangunan ZI; 2. memberikan saran perbaikan untuk pembangunan ZI; dan 3. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
Satuan Pengukuran	:	Jumlah
Unit Penanggung jawab	:	Inspektorat
Penyedia Data	:	Inspektorat
Sumber Data	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Evaluasi Zona Integritas Eselon I Kemenko Infra Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Inspektorat 2. Surat Usulan Unit Kerja Kemenko Infra sebagai Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK yang dikeluarkan oleh Inspektorat
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
Tabel Data	:	

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	N/A	N/A	-
TRIWULAN 2	N/A	N/A	-
TRIWULAN 3	N/A	N/A	2
TRIWULAN 4	N/A	N/A	-

**Manual Indikator Kinerja
Inspektorat**

Sasaran Kegiatan (SK)	:	SK 3. Meningkatkan Peran APIP dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)
Deskripsi SK	:	Meningkatkan peran APIP dalam tata kelola pemerintahan yang baik merupakan upaya APIP untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).
Indikator Kinerja (IK)	:	IKSK 3.1 Indeks Kapabilitas APIP Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025
Kualitas IK	:	<input type="checkbox"/> <i>Ultimate Outcome</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Intermediate Outcome</i> <input type="checkbox"/> <i>Immediate Outcome</i> <input type="checkbox"/> Output
Deskripsi IK	:	<p>Definisi: Indeks kapabilitas APIP adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kemampuan dan kematangan sebuah Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Indeks ini diawali dihitung berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat sendiri kemudian dievaluasi BPKP, dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Karakteristik Level Kapabilitas APIP terbagi dalam 5 Level yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Level 1 (<i>Initial</i>); 2. Level 2 (<i>Structured</i>); 3. Level 3 (<i>Delivered</i>); 4. Level 4 (<i>Institutionalized</i>); 5. Level 5 (<i>Optimized</i>). <p>Formula: Level Kapabilitas APIP Tahun 2025</p> <p>Tujuan: Untuk meningkatkan sikap dan perilaku APIP dalam melakukan peran dan layanan secara efektif dan efisien sehingga APIP dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan peringatan dini kepada <i>Stakeholder</i>; 2. Meyakinkan <i>stakeholder</i> bahwa pengawasan yang dilakukan telah memadai; 3. Memberikan rekomendasi yang dapat memelihara dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Satuan Pengukuran	:	Level
Unit Penanggung jawab	:	Inspektorat
Penyedia Data	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh BPKP
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last known value
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2024		2025
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	-	-	-
TRIWULAN 2	-	-	-
TRIWULAN 3	-	-	-
TRIWULAN 4	3,5	3,58	Level 3

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AYODHIA G.L. KALAKE